



**RINGKASAN**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**(RLPPD)**  
**TAHUN 2022**



I Gede Dana, S.Pd.,M.Si  
Bupati Karangasem

Dr. I Wayan Artha Dipa, SH.,MH  
Wakil Bupati Karangasem

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**TAHUN 2023**



**RINGKASAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
(RLPPD) TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

*Puja Pengastuti dan Angayu Bagya*, puji dan syukur saya haturkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* Tuhan Yang Maha Esa karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha-Nya*, penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2022 telah dapat diselesaikan tepat waktu.

RLPPD Akhir Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Karangasem merupakan Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2022, sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi sesuai prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Adapun substansi dari laporan ini mencakup: gambaran umum daerah dan kinerja makro, ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan opini laporan keuangan, ringkasan APBD, dan inovasi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Semoga RLPPD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem serta dijadikan sebagai referensi dan pijakan bagi pelaksanaan pembangunan kedepan di Kabupaten Karangasem. Hasil evaluasi baik berupa analisis, pandangan, catatan, masukan maupun saran sangat dibutuhkan untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Karangasem pada tahun-tahun mendatang.

*Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.*

Amlapura, 27 Maret 2023  
Bupati Karangasem,  
I Gede Dana, S.Pd., M.Si



## DAFTAR ISI

Sampul Depan .....	i
Halaman Judul.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I Gambaran Umum dan Kinerja Makro.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Dasar Hukum .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Gambaran Umum Daerah .....</b>	<b>2</b>
a. Kondisi Geografis Daerah.....	2
b. Jumlah Penduduk .....	5
c. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan .....	7
d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah .....	8
<b>C. Capaianj Kinerja Makro .....</b>	<b>12</b>
a. Indek Pembangunan Manusia.....	12
b. Angka Kemiskinan.....	13
c. Angka Pengangguran .....	14
d. Pertumbuhan Ekonomi.....	15
e. Pendapatan Per Kapita.....	16
f. Indeks Gini Rasio ( Ketimpangan Pendapatan) .....	16
<b>BAB II Ringkasan Capijan Kinerja urusan Pelayanan Dasar .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
a. Pendidikan .....	28
b. Kesehatan .....	32
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	37
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman .....	40
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ...	43
f. Sosial.....	53

<b>BAB III Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini</b>	
Laporan Keuangan.....	57
1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) .....	57
A. Pelaksanaan Evaluasi .....	57
B. Hasil Evaluasi Tim Daerah Inspektorat Provinsi Bali .....	58
2. Opini Laporan Keuangan .....	89
<b>BAB IV Ringkasan APBD.....</b>	<b>90</b>
A. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	90
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	90
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	94
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	100
B. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .....	102
C. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022.....	106
<b>BAB V Inovasi Daerah .....</b>	<b>108</b>
<b>BAB VI Penutup .....</b>	<b>112</b>

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM DAN KINERJA MAKRO**

### **A. DASAR HUKUM**

Dalam perjalanan sejarahnya asal mula terbentuknya Kabupaten Karangasem sebagai daerah Otonom diawali saat terbentuknya Negara Indonesia Timur dimana muncul daerah-daerah yang dikenal dengan istilah Swapraja. Salah satunya adalah “Daerah Swapraja Karangasem” yang merupakan bagian dari “Daerah Bali” sesuai dengan Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946 No. 143).

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 9 Agustus 1958 ((Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)). Dalam substansi undang-undang ini keberadaan daerah Swapraja Karangasem secara resmi dibubarkan dengan pembentukan daerah-daerah tingkat II, termasuk dalam Daerah tingkat I Bali, dengan diberi nama-nama:

1. Daerah Tingkat II Buleleng;
2. Daerah Tingkat II Jembrana;
3. Daerah Tingkat II Badung;
4. Daerah Tingkat II Tabanan;
5. Daerah Tingkat II Gianyar;
6. Daerah Tingkat II Klungkung;
7. Daerah Tingkat II Bangli.
8. Daerah Tingkat II Karangasem.

Dalam bagian selanjutnya dijelaskan bahwa tempat kedudukan (ibu kota) pemerintah daerah-daerah tersebut untuk daerah tingkat II Karangasem berkedudukan di Karangasem. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 merupakan dasar pembentukan Kabupaten Karangasem yang menjadi dasar hukum keberadaan daerah otonom dimana sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, kini Daerah Tingkat II Karangasem dikenal dengan Kabupaten Karangasem, sehingga dalam setiap produk hukum baik peraturan daerah maupun peraturan bupati, selalu merferensi Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagai dasar pembentukan Kabupaten Karangasem.

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **a. Kondisi Geografi Daerah**

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km<sup>2</sup> atau 83.954 Ha (14,90% luas Pulau Bali) dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Karangasem memiliki 8 (delapan) Kecamatan, Dari delapan kecamatan tersebut, Kecamatan Kubu merupakan wilayah paling luas yaitu mencapai 234,72 Km<sup>2</sup>. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Hektar (Ha)	Persentase (%)
1	Rendang	109,7	10.970	13,07
2	Sidemen	31,15	3.515	4,79
3	Manggis	69,83	6.983	8,32
4	Karangasem	94,23	9.423	11,22
5	Abang	134,05	13.405	15,97
6	Bebandem	81,51	8.151	9,71
7	Selat	80,36	8.035	9,57
8	Kubu	234,72	23.472	27,95
Jumlah		839,54	83.954	100,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022



Kabupaten Karangasem merupakan satu dari sembilan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Secara astronomis, Kabupaten Karangasem yang dikenal dengan Kabupaten “Lahar” (akibat letusan Gunung Agung) berada pada posisi  $8^{\circ} 00' 00''$  -  $8^{\circ} 41' 37,8''$  Lintang Selatan, dan  $115^{\circ} 35' 9,8''$  -  $115^{\circ} 54' 8,9''$  Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

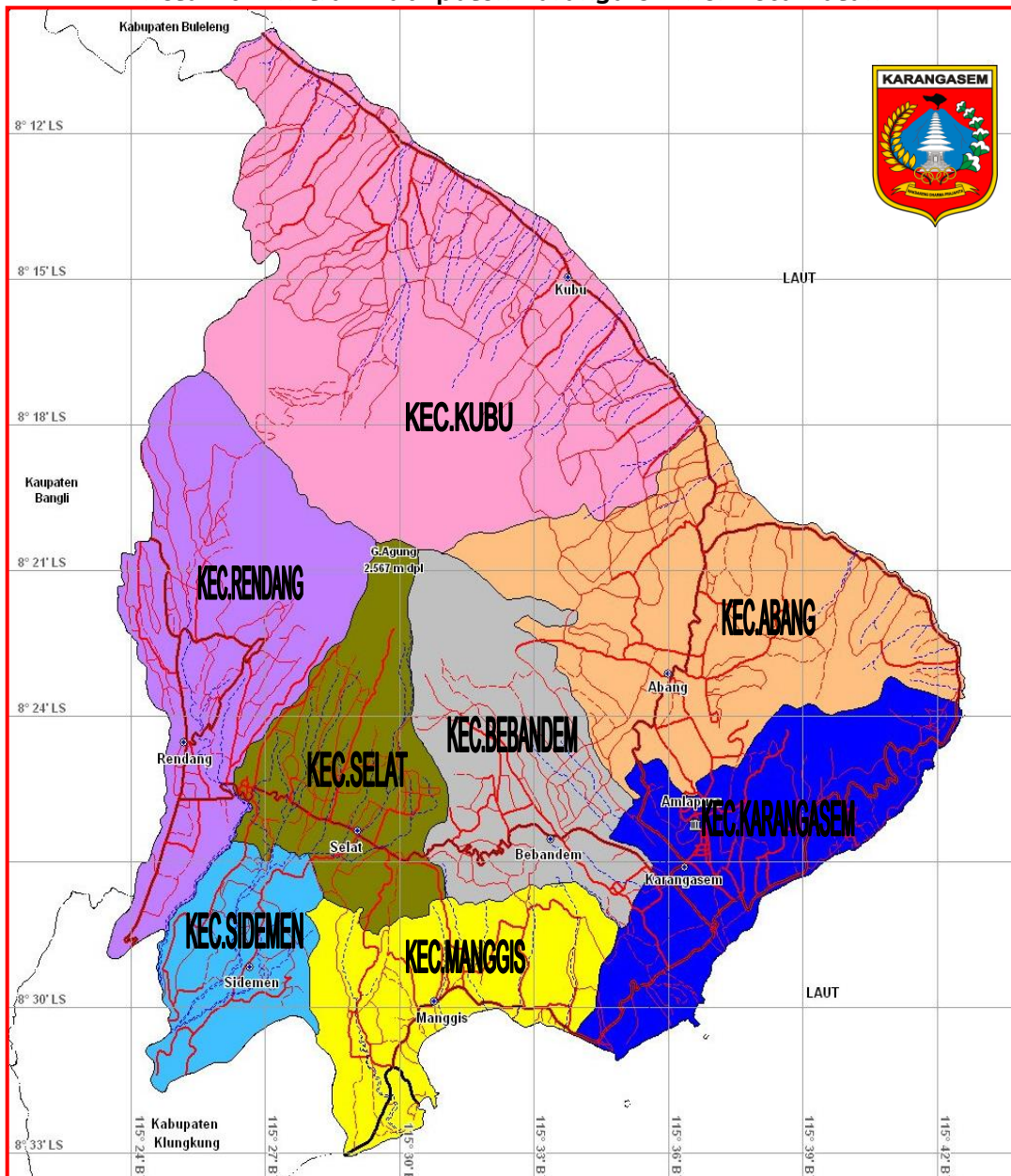
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Lokasi Kabupaten Karangasem yang berada pada ujung Timur Pulau Bali menjadikan daerah ini menjadi salah satu akses transportasi barang yang utama antara Pulau Bali dan Pulau Lombok dengan keberadaan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten ini.

Secara administrasi kewilayahan, kabupaten dengan luas wilayah mencapai  $839,54 \text{ km}^2$  terbagi kedalam 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 75 desa. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar merupakan lahan kering dengan luas mencapai  $768,14 \text{ km}^2$  (91,50%), sementara lahan basah berupa persawahan hanya seluas  $71,4 \text{ km}^2$  (8,50%).



Gambar 1.1  
Peta Administrasi Kabupaten Karangasem Per Kecamatan



Sumber : Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Karangasem 2022

Dari sisi topografis, daratan Kabupaten Karangasem umumnya berupa perbukitan dimana 43,5 % wilayahnya memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Bentangan pantai yang dimiliki kabupaten ini cukup panjang, yang mencapai 87 kilometer karena wilayah Karangasem memang dikelilingi dengan lautan dari sisi Utara, Timur dan Selatan.

### **b. Jumlah Penduduk**

Dari segi demografis, Kabupaten Karangasem memiliki potensi penduduk yang strategis dengan jumlah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Sisi positif dari pertumbuhan penduduk adalah tersedianya tenaga kerja potensial bagi peningkatan produktivitas karangasem, sementara dari sisi negatif pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan produksi pangan yang cukup.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan penurunan hingga mencapai 12,16 % di tahun 2018 atau menurun sejumlah 62.123 jiwa, ini diakibatkan adanya pendataan dan pemuktahiran data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem. Jumlah sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Karangasem yakni sejumlah 526.257 orang.

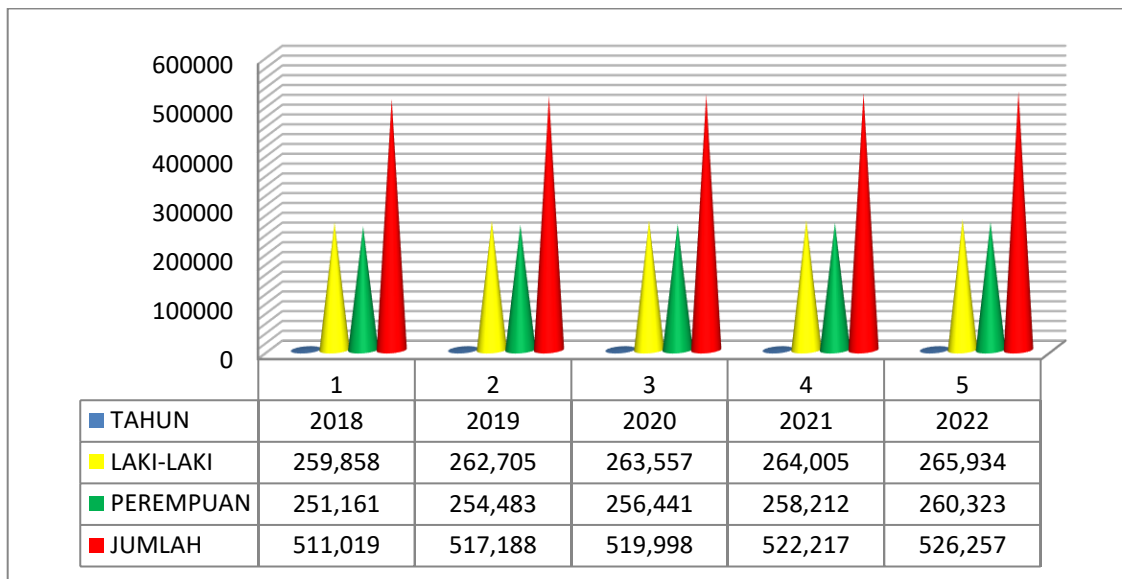
Tabel 1.2  
Perkembangan Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG	%
2018	259.858	251.161	511.019	-62.123	-12,16
2019	262.705	254.483	517.188	6.169	1,19
2020	263.557	256.441	519.998	2.810	0,54
2021	264.005	258.212	522.217	2.219	0,43
2022	265.934	260.323	526.257	4.040	0,77

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2022

Grafik 1.1

Peningkatan Jumlah Penduduk Kab. Karangasem Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2022

Persebaran penduduk tersebut per kecamatan juga masih menunjukkan adanya persebaran yang kurang merata dengan tingkat kepadatan penduduk terendah sejumlah 378 jiwa per kilometer persegi di Kecamatan Kubu, sementara kepadatan tertinggi berada di kecamatan Sidemen dengan tingkat kepadatan mencapai 1.124 Jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah 35,15 Km<sup>2</sup>. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Rendang dan Kubu disebabkan oleh kondisi topografi kedua kecamatan tersebut yang sebagian besar berupa bukit dan gunung serta lahan kering. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Karangasem sejumlah 723 Jiwa per kilometer persegi. Kurang meratanya persebaran penduduk ini juga membawa permasalahan adanya permukiman kumuh, terutama di kantong-kantong permukiman yang padat.

Tabel 1.3  
Persebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		TOTAL	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PER KM2
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	ABANG	44.336	42.878	87.214	134,05	651
2	BEBANDEM	29.316	28.774	58.090	81,51	713
3	KARANGASEM	53.091	52.273	105.364	94,23	1118
4	KUBU	45.229	43.402	88.631	234,72	378
5	MANGGIS	28.850	28.511	57.361	69,83	821
6	RENDANG	21.998	21.501	43.499	109,7	397
7	SELAT	23.301	23.285	46.586	80,35	580
8	SIDEMEN	19.813	19.699	39.512	35,15	1124
<b>TOTAL</b>		<b>265.934</b>	<b>260.323</b>	<b>526.257</b>	<b>839,54</b>	<b>5781</b>
<b>Rata-rata Total</b>						<b>723</b>

Sumber : diolah dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2022

### c. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu. Di Kabupaten Karangasem terdapat 78 Desa/ Kelurahan yang terdiri dari 75 Desa Definitif, dan 3 Kelurahan, sedangkan desa adat terdapat sebanyak 190 desa adat yang meliputi 714 banjar adat. Banjar dinas sebanyak 539 banjar dinas/dusun, dan 52 lingkungan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa Adat	Banjar Adat	Banjar Dinas	Lingkungan
1	Rendang	6	-	26	66	62	-
2	Sidemen	10	-	19	71	51	-
3	Manggis	12	-	20	82	59	-
4	Karangasem	8	3	23	180	76	52
5	Abang	14	-	20	97	96	-
6	Bebandem	8	-	15	68	70	-
7	Selat	8	-	27	97	66	-
8	Kubu	9	-	41	111	74	-
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>3</b>	<b>190</b>	<b>772</b>	<b>554</b>	<b>52</b>

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

**d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem

No	Nama Perangkat Daerah	Sub Bagian Dari Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah Kab. Karangasem	- Bagian Pemerintahan dan Kesra - Bagian Hukum - Bagian Protokol dan Kopim - Bagian Perekonomian dan Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Organisasi - Bagian Umum	
2.	Sekretariat DPRD Kab. Karangasem		
3.	Inspektorat Daerah Kab. Karangasem		
	DINAS DAERAH KAB. KARANGASEM		
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem		
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem		
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karangasem		
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem		
8.	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kab. Karangasem		

9.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem		
10.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem		
11.	Dinas Kesehatan Kab. Karangasem		
12.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem		
13.	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem		
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem		
15.	Dinas Perhubungan Kab. Karangasem		
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem		
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem		
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kab. Karangasem		
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karangasem		
20.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Karangasem		
	<b>BADAN DAERAH</b>		
21.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Karangasem		
22.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem		
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Karangasem		
	<b>KECAMATAN</b>		

24.	Kecamatan Karangasem		
25.	Kecamatan Kubu		
26.	Kecamatan Abang		
27.	Kecamatan Bebandem		
28.	Kecamatan Selat		
29.	Kecamatan Manggis		
30.	Kecamatan Rendang		
31.	Kecamatan Sidemen		
	PEMERINTAHAN UMUM		
32.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Karangasem		
	PENANGGULANGAN BENCANA		
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karangasem		

*Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem, Tahun 2022*

Dalam menjalankan pemerintahannya, tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karangasem didukung oleh 6.065 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 5.517 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 548, serta 4.498 Pegawai Non ASN/ Kontrak yang tersebar pada berbagai instansi. Berdasarkan golongan/ruang jumlah PNS Kabupaten Karangasem, pada golongan III/d menempati jumlah terbanyak 1.024 dan paling sedikit pada golongan I/b dengan jumlah 1 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan yang sebagian besar ASN sudah berijazah S.1 dengan jumlah 4.164. Jenis Kelamin maka dapat dilihat ASN di Kabupaten Karangasem berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3.257 orang, sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.808 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel Rekapitulasi Jumlah PNS dan PPPK Kabupaten Karangasem berdasarkan golongan/ruang dan pendidikan Tahun 2022 berikut.



**Tabel 1.6**  
**Rekapitulasi Jumlah PNS dan PPPK Kabupaten Karangasem**  
**berdasarkan golongan/ruang dan pendidikan Tahun 2022**

Berdasarkan Golongan Ruang					
No	Gol./ruang untuk PNS	Jumlah	Gol./Ruang untuk PPPK	Jumlah	Keterangan
1	I/a	0	I	0	
2	I/b	1	II	0	
3	I/c	31	III	0	
4	I/d	39	IV	0	
5	II/a	44	V	0	
6	II/b	102	VI	0	
7	II/c	225	VII	0	
8	II/d	323	VIII	0	
9	III/a	399	IX	543	
10	III/b	689	X	0	
11	III/c	995	XI	0	
12	III/d	1024	XII	0	
13	IV/a	699	XII	0	
14	IV/b	800	XIV	0	
15	IV/c	142	XV	0	
16	IV/d	4	XVI	0	
17	IV/e	0	XVII	0	
<b>Jumlah</b>		<b>5.517</b>		<b>543</b>	
Berdasarkan Pendidikan					
No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan		
1	SD	48			
2	SMP	110			
3	SMA	479			
4	SMK	259			
5	D.1	11			
6	D.II	101			
7	D.III	490			
8	S.1	4164			
9	S.2	403			
10	S.3	0			
<b>Jumlah</b>		<b>6.065</b>			

*Sumber : BKPSDM Kab. Karangasem Tahun 2022 pada pemerataan pendapatan.*

## **C. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

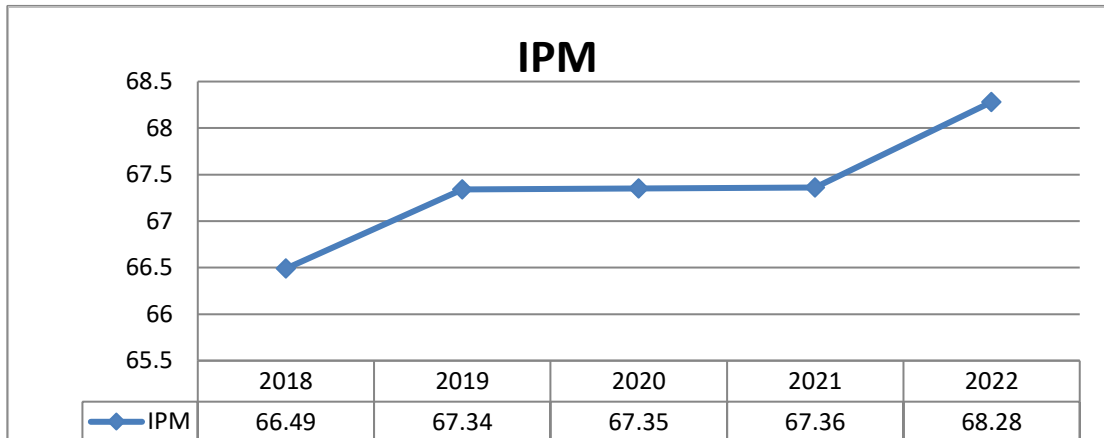
Aspek kesejahteraan ekonomi yang penting diukur adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem atau laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan, Penduduk miskin dan IPM. Data-data berikut merupakan data rilis terakhir dari Badan Pusat Statistik.

### **1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Karangasem periode tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem mencapai 67,36 dan IPM tahun 2022 sebesar 68,28 Secara rinci perkembangan IPM Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

**Garfik 2.1**  
**IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022**



*Sumber* : Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2022

## 2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. BPS menggunakan beberapa indikator dalam pengukuran tingkat kemiskinan, yaitu Garis Kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan.

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022**

<b>Kemiskinan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	26.020	25.990	24.690	28.520	29,450
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,28	6,25	5,91	6,78	6,98

*Sumber Data*: Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2022

Dalam kurun waktu 2018-2020 Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 26.020 jiwa (6,28%) turun menjadi 24.690 jiwa (5,91%) pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena beberapa program dan kebijakan pemerintah sudah dapat berjalan seperti bedah rumah, program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pada tahun 2021

sampai dengan tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Krangasem mengalami peningkatan, ini diakibatkan pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya di Kabupaten Karangasem.

### 3. Angka Pengangguran

Pengangguran masih menjadi masalah utama setiap daerah terutama di negara sedang berkembang. Pengangguran terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja dan masih rendahnya daya saing tenaga kerja. Demikian juga di Kabupaten Karangasem, penurunan jumlah penduduk yang bekerja meningkatkan jumlah pengangguran.

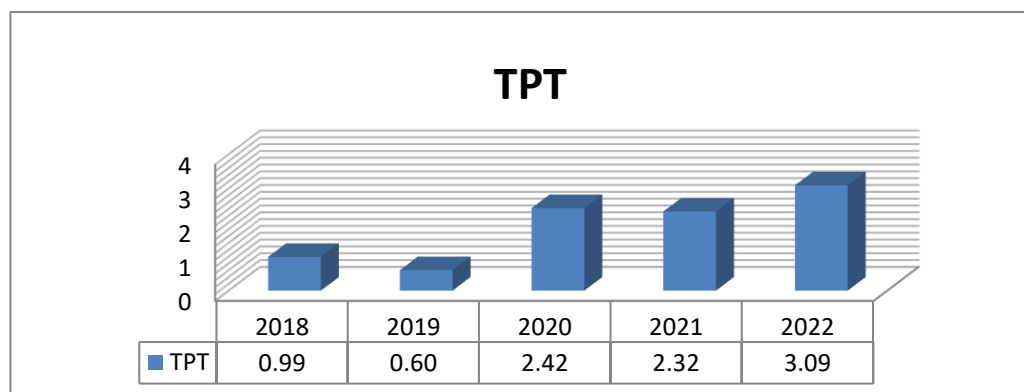
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Karangasem dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 pengangguran terbuka 0,99 %, sedangkan pada tahun 2022 sekarang sudah mencapai 3,09 %.

Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Karangasem dalam lima tahun mendatang dalam upaya pengurangan pengangguran adalah:

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor lapangan usaha.
2. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja belum mampu diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja.
3. Masih rendahnya investasi yang bersifat padat karya di daerah.

Grafik 2.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022



Sumber : Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2022

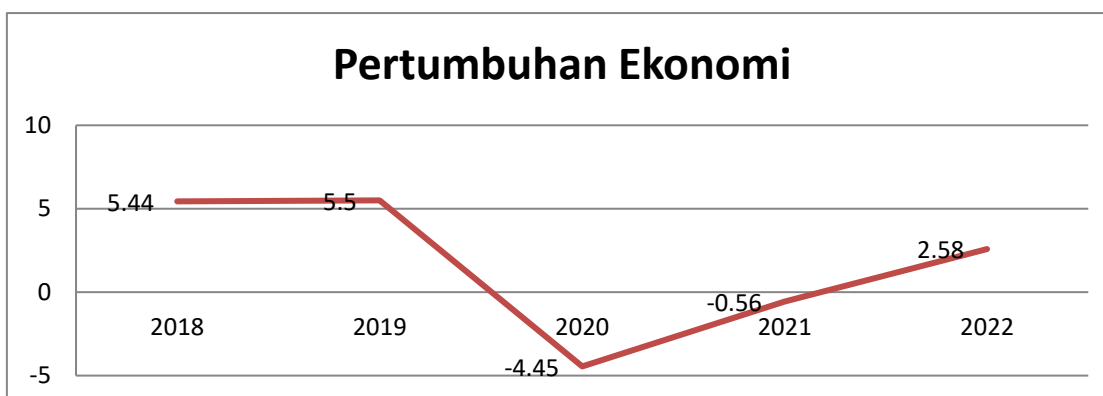
#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Selama tahun 2018-2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem cenderung fluktuatif. Di tahun 2018 menjadi 5,44 %, naik di tahun 2019 menjadi 5,50% dan di tahun 2020 mengalami penurunan hingga - 4,45% akibat wabah pandemi Covid-19 masih terus menjangkiti Indonesia, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan 2,58%. Tidak hanya menyerang bidang kesehatan namun pandemi ini juga telah meluluhlantakkan persendian perekonomian. Berbagai usaha pemerintah yang telah dilakukan pada tahun 2020 sampai sekarang, nyatanya belum mampu menahan kontraksi ekonomi seperti yang disajikan pada grafik 2.3

Grafik 2.3  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karangasem



Sumber : Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2022

## 5. Pendapatan Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Karangasem Tahun 2018 mencapai Rp 38,30 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Karangasem menerima pendapatan sebesar Rp 38,30 juta selama tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, rata-rata pendapatan per Kapita penduduk Karangasem mencapai Rp 34,56 juta atau sebesar 2,88 juta per bulan, untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem (ribu rupiah)	2018	2019	2020	2021	2022
ADHB ( Atas Dasar Harga Berlaku)	38,30	40,98	33,32	32,96	34,56
ADHK (Atas Dasar Harga Konstan)	25,43	26,72	25,40	21,10	Belum rilis

Sumber : Bapelitbangda Kab. Karangasem, dan BPS Kab. Karangasem, 2022

## 6. Indeks Gini Rasio ( Ketimpangan Pendapatan)

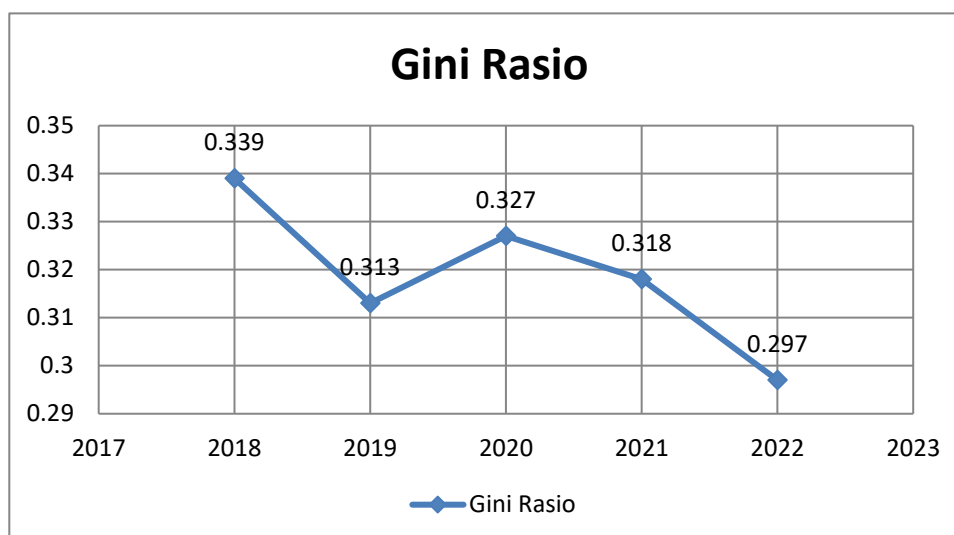
Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

- $GR \leq 0,20$  -kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
- $0,20 < GR \leq 0,39$  - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- $0,39 < GR \leq 0,59$  - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- $0,59 < GR \leq 0,79$  - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.

- $GR > 0,79$  - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah tahun 2022 sebesar 0,297. Selengkapnya disajikan pada grafik 2.4 berikut :

Grafik 2.4  
Indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2022

Tabel 2.3  
Rekapan Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia	67,36	68,28	0,92
2	Angka Kemiskinan	28,52	29,45	0,93
3	Angka Pengangguran	2,32	3,09	0,77
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,56	2,58	3,14
5	Pendapatan Per Kapita	32,96	34,56	1,6
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,318	0,297	-0,021

Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2022



## **BAB II**

### **RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sesuai dengan yang tertuang dalam Visi Misi Kabupaten Karangasem dalam RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Karangasem 2021-2026 adalah :

**“Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi”**

Sedangkan Misi Kabupaten Karangasem adalah :

1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan.
2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.
3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konprehensif dan Terintegrasi.
4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi.
5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban secara Terpadu.
6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima.

## Kebijakan Umum Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

### 1. Pendidikan

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pendidikan. Pendidikan erat kaitannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sesuai arah kebijakan dan pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, berorientasi pada upaya pemenuhan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Karangasem di fokuskan tuntas wajib belajar 9 Tahun serta melalui program penyelenggaraan pendidikan terfokus pada pembagunan TK/PAUD yang berbasis Hindu.

Pembangunan disektor pendidikan meliputi penyediaan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah, tenaga pengajar, kelengkapan literatur, serta sarana penunjang lainnya. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Karangasem sebanyak 78 dan yang tersedia Pos PAUD (69 sekolah), TK (133 sekolah), SD (364 sekolah), SMP (51 sekolah).

### 2. Kesehatan

#### a) Ketersediaan Sarana Kesehatan

Perencanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sudah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Karangasem dengan target pencapaian kinerja sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin.

Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Selain itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan klinik merupakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di Kabupaten Karangasem terdapat 3 buah Rumah Sakit Umum, 8 Poliklinik, 12 Puskesmas, 61 Puskesmas Pembantu, 16 buah Apotik.

b) Pelayanan Tenaga Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit di Kabupaten Karangasem dilakukan oleh 47 orang dokter umum di Puskesmas dan 48 orang di Rumah Sakit. Dokter Gigi sebanyak 20 orang bertugas di Puskesmas dan 4 orang di Rumah Sakit. Jumlah dokter spesialis sebanyak 61 orang yang semuanya bertugas di Rumah Sakit. Jumlah dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Karangasem masih sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali

c) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Beberapa Indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) rata-rata lama hari perawatan (Length of Stay/LOS), rata-rata tempat tidur dipakai (Bed Turn Over/BTO), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur (Turn of Interval/TOI), persentase pasien keluar yang meninggal (Gross Death Rate/GDR), dan persentase pasien keluar yang meninggal > 48 jam perawatan (Net Death Rate/NDR).

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur RS, BOR ideal mencapai (60-80%) dan untuk RSUD Amlapura Tahun 2020 nilai BOR sebesar 35,4%. BOR RS BaliMed Karangasem 37,6%, sedangkan untuk RS Pratama Kuba sebesar 10,5%

LOS adalah rata-rata lama rawat (hari) seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari. Sedangkan TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah digunakan sampai saat digunakan kembali (rata-rata lama tempat tidur kosong antara pasien satu dengan pasien berikutnya). Idealnya tempat tidur kosong pada kisaran 1-3 hari.

GDR adalah angka kematian umum setiap 1.000 penderita keluar Rumah Sakit. Pada GDR, tidak melihat berapa lama pasien berada di Rumah Sakit dari masuk sampai meninggal. Nilai ideal GDR adalah <45 per 1.000 pasien keluar. NDR adalah angka kematian pasien setelah dirawat > 48 jam per

1.000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di Rumah Sakit. Asumsinya jika pasien meninggal setelah mendapatkan perawatan 48 jam berarti ada faktor pelayanan Rumah Sakit yang terlibat dengan kondisi meninggalnya pasien. Namun jika pasien meninggal < 48 jam masa perawatan, dianggap faktor keterlambatan pasien datang ke Rumah Sakit yang menjadi penyebab utama pasien meninggal. Nilai NDR yang ideal adalah < 25 per 1.000 pasien keluar.

Pencapaian NDR tahun 2020 untuk RSUD Karangasem belum ideal. Pada Tahun 2020 angka GDR di RSUD Kabupaten Karangasem lebih besar dari nilai ideal yaitu sebesar 38,2 per 1000 pasien keluar dan NDR 17,7 per 1.000 pasien keluar.

d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Di Kabupaten Karangasem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pra bayar yang dikelola oleh pemerintah meliputi JKN dan JKBM. Pada Tahun 2020 cakupan peserta JKN adalah sebesar 509.335 orang, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 152.690 orang, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebesar 208.746, pekerja penerima upah sebanyak 88.740 orang. Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebesar 55.230 orang. Bukan Pekerja sebesar 3.929 orang.

e) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat Sesuai arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan, berorientasi pada upaya pemenuhan kualitas yang memadai dengan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya yaitu menyediakan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat daruratan) atau antar jemput pasien dengan kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan di 8 Kecamatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang. Pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur

dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dalam bidang irigasi bertujuan untuk meningkatkan jaringan saluran irigasi untuk memberikan peningkatan kebutuhan akan air kepada masyarakat petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Karangasem program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi mempunyai dampak yang positif terhadap persawahan, ladang, dan kehidupan masyarakat. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan di realisasikan dengan kegiatan utama yaitu Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Dari data jaringan irigasi, luas daerah jaringan irigasi di Kabupaten Karangasem yakni 5.476 ha yang mengairi 116 Daerah Irigasi (DI). Keberhasilan dari program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan diukur dari terpenuhinya 53 paket pekerjaan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan atau sebanyak sebanyak 4,3% mencapai realisasi fisik 600% dari target yang ditetapkan.

Dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah, jalan merupakan sarana sangat penting untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui darat. Jalan yang ada di Kabupaten Karangasem terdiri dari Jalan Negara (97,97 Km), Jalan Provinsi (145,77 Km) dan Jalan Kabupaten (1.202,54 Km). Kabupaten Karangasem paling banyak memiliki jalan kabupaten/kota demikian juga paling banyak memiliki panjang jalan mencapai 1.423,99 Km.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Sesuai arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan program kawasan permukiman, berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman, salah satunya pemberian bantuan untuk membangun/merehabilitasi rumah yang tidak layak huni untuk masyarakat miskin melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha. Pada Tahun 2021 sesuai data BDT (TNP2K) yang dimasukkan kedalam basis data e-RTLH sebanyak 2.635 unit.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

a) Pelayanan Trantibum Linmas

Target pencapaian pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karangasem belum mencapai target optimal yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota khususnya pada indikator cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota yang mencapai 75 dari target 95. Sementara indikator capaian pelayanan dari sisi Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota dan Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat/ Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sudah mencapai kinerja 100%. Untuk memenuhi target capaian yang belum optimal maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta linmas di wilayah masing-masing.

b) Penanggulangan bencana.

Kabupaten Karangasem merupakan wilayah resiko kebencanaan yang tertinggi di Bali. Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, Karangasem masuk pada potensi rawan sedang bencana Tsunami.



Berbagai program pokok yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem antara lain: Program Peningkatan Peran Kehumasan dengan kegiatan Peningkatan Peran Pusdalops dalam penyampaian informasi kebencanaan / Publikasi dan Interaksi Media; Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam; b. Pos Emergency Service Respon di Kabupaten Karangasem; c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; d. Pembentukan Sekolah Aman Bencana (SAB); e. Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralata; f. Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana; g. Operasional Tim Siaga Bencana; h. Mitigasi Bencana; dan i. Pengadaan logistik di Pos Komando;

Program Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Orientasi Manajemen Penanggulangan Bencana Bidang Penampungan Darurat; b. Orientasi Manajemen Penanggulangan Bencana; c. Orientasi Manajemen Penanggulangan Bencana Bidang Assesment; dan d. Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana; Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat, dengan kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana; Program Peringatan Dini, dengan kegiatan Pembangunan Sistem Peringatan Dini; dan Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kepemanduan Wisata Tirta; dan b. Pembangunan Pos Pengawas Pantai untuk Kebencanaan di Pantai

#### c) Pelayanan Kebakaran

Kinerja pelayanan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karangasem belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari *respond time* 15 menit yang baru bisa tercapai 28,12 menit di tahun 2020 dengan persentase kasus kebakaran yang ditangani sebesar 87,88%. Hal ini disebabkan karena Pos pelayanan pemadam

Kebakaran belum ada merata di seluruh kecamatan. Pos pemadam yang sudah ada yaitu di Kecamatan Karangasem, Kubu, dan Abang. Kedepan dengan pembangunan pos pelayanan yang ada di masing-masing kecamatan, didukung dengan ketersediaan SDM serta sarana prasarana yang memadai maka kinerja pelayanan kebakaran dapat mencapai target SPM yang ditetapkan.

#### 6. Sosial

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sosial. Pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan nasional memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Sosial (PMKS). Jumlah Panti Asuhan sampai tahun 2020 sebanyak 3 buah, terdiri dari Panti Asuhan Yasa Kerti, Panti asuhan Yassika dan Panti Asuhan Widayasih VII. Jumlah anak asuh yang ada pada ketiga panti asuhan sebanyak 89 orang, penghuni 89 orang dan kapasitas tampung 89 orang.

Sesuai arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial, berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Karangasem melalui program rehabilitasi sosial salah satunya yaitu pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas) yang berorientasi pada kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Karangasem, Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam ketentuan perundang-undangan terbaru,

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Pembagian 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	NAMA OPD PENYELENGGARA
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.2  
Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Wajib	Tahun 2022		Persentase (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Pendidikan	601.084.504.570,00	550.781.947.917,70	91,63
2	Kesehatan	241.385.015.332,00	204.547.772.012,00	84,74
3	Pekerjaan Umum dan Penataan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ruang	124.613.201.784,00	95.572.203.720,00	90,47
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	23.614.901.093,00	21.862.923.344,00	92,58
6	Sosial	16.428.253.803,00	10.837.289.091,00	65,97
	<b>JUMLAH</b>	1.007.125.876.582,00	883.602.136.084,70	87,73

Sumber : Simda Keuangan 2022 (unaudited) BPKAD Kab. Karangasem

## A. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

### a. Pendidikan

#### 1. Program dan Kegiatan

Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dalam melaksanakan urusan wajib pendidikan serta urusan pemuda dan olah raga, terdapat 4 pelayanan dasar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Secara rinci program yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	1. Penyedia Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	128.630.300	2.554.150	1,99 %
	2. Penyedia Alat praktik dan praga siswa	2.883.878.000	2.879.637.200	99,85 %
	3. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatipitas Siswa	63.061.750	44.765.400	70,99 %
	4. Pengelola Dana Bos Sekolah Dasar	47.410.215.615,54	44.418.287.425,28	94,52%
	5.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	46.612.075	29.303.000	64,24%
B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	12.475.000	300.000	0,24%
	2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	98.916.800	78.620.900	79,48 %
	3. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.002.500	6.339.800	79,97 %
	4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	81.494.700	53.841.850	66,07 %
	5. Pengelola Dana Bos Sekolah Dasar	29.213.038	21.402.129.126,32	73,26 %
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	1. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	107.421.800	93.225.900	86,78 %
	2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	3.609.469,875	2.232.436,875	94,67 %
	3.Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.673.540.000	3.673.540.000	100%
	4.Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi satuan PAUD	213.412.000	207.163.600	97,07%
D	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	286.391.500	275.261.500	96,11 %
	2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Nonformal/Kesetaraan	1.532.518.400	1.483.221.600	96,78 %
	3.Pengadaan Perlengkapan Pendidik Nonformal/Kesetaraan	48.942.500	19.541.763	39,93%

## 2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Bidang Urusan Pendidikan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

Adapun jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Capaian Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Karangasem Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator capaian /Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			96%
		<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
	Jumlah yang Harus Dilayani	12428	12428	0	100 %
		<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</i>	
1	Buku Gambar	5238	0 buah	0 buah	100%
2	Alat mewarnai	5238	0 buah	0 buah	100%
3					
3	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	404 orang	404 orang	0 rombel	100%
4	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	615 orang	615 orang	0 rombel	100%
5	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.952 rombel	2952 rombel	0 rombel	100%
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.829.724.850 Rupiah	1.829.724.850 Rupiah	0 rupiah	100%
7	Kualitas pendidik yang	3.557 orang	3.557 orang	0 orang	100%

	berkualifikasi S1/D-IV				
8	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	404 satuan pendidikan	404 satuan pendidikan	0 satuan pendidikan	100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan			28.19 %
		<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
	Jumlah yang Harus Dilayani	22.090 orang	17.090 orang	5000 orang	77.37%
		<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</i>	
1	Modul Belajar	3.855 modul	1.216 modul	2639 modul	31,54 %
2	jumlah rombongan belajar di PKBM	10 rombel	10 rombel	0 rombel	0%
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2.760.853.600 rupiah	2.760.853.600 rupiah	0 rupiah	100%
4	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	155 orang	115 orang	40 orang	74.19%
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	13 orang	13 orang	0 orang	100%
6	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	26 orang	26 orang	0 orang	100%
7	Perlengkapan Belajar	0 buah	0 buah	0 buah	0%
8	PKBM Terakreditasi minimal C	13 sekolah	10 sekolah	3 sekolah	76.92%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			100.00 %
		<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
	Jumlah yang Harus Dilayani	7.137 orang	7.137 orang	0 orang	100.00 %
		<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</i>	
1	Buku Gambar	2.602 buah	2.602 buah	0 buah	100%
2	Alat Mewarnai	794 buah	794 buah	0 buah	100%
3	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	73 satuan pendidikan	73 satuan pendidikan	0 satuan pendidikan	100%
4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	3.275.264.600 rupiah	3.275.264.600 rupiah	0 rupiah	100%
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	259 orang	259 orang	0 orang	100%
6	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	87 orang	87 orang	0 orang	100%
7	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	279 rombel	279 rombel	0 rombel	100%

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

- a. PNS = 94 orang
- b. Non PNS = 87 orang

#### 4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

- Terlambatnya petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, yang menyebabkan terhambatnya perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan DAK.
- Kurangnya konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan, sehingga masih relative banyak kegiatan yang baru direalisasikan pada akhir tahun anggaran atau bahkan tidak direalisasikan.
- Relatif banyaknya sekolah dan letak geografis sekolah yang sulit dan saling berjauhan, yang menjadi sasaran lokasi kegiatan, memerlukan tenaga dan waktu yang lebih banyak.
- Sumber daya manusia yang relatif masih kurang baik jumlah maupun kualitasnya.
- Banyaknya masalah-masalah yang harus diselesaikan yang muncul dari tenaga pendidik dan kependidikan pada tingkat satuan pendidikan baik dari TK, SD, SMP di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem, menyita waktu dan perhatian yang cukup banyak untuk menyelesaikannya

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang begitu kompleks, beberapa strategi yang telah diambil selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Setiap kepala bidang mempresentasikan rencana kegiatan pada tahun anggaran pada awal tahun dihadapan seluruh karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk lebih memahami kegiatan di masing-masing bidang.
2. Menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan bidang-bidang bersama-sama sebagai pedoman evaluasi.



3. Melaksanakan evaluasi rutin setiap saat terhadap perkembangan realisasi keuangan dan fisik dari masing-masing bidang melalui rapat rutin mingguan dan bulanan.
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, seperti pelatihan pengelolaan keuangan, diklat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
5. Menyepakati tata nilai, komitmen, dan semboyan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi.
6. Menumbuhkan budaya organisasi dan pembelajaran organisasi melalui arahan-arahan dalam rapat-rapat dan kegiatan apel pagi.
7. Mengundang pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda) dalam silaturahmi bersama untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja seluruh karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.

## **b. Kesehatan**

### **1. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. Pada tahun 2022, dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem melaksanakan 12 pelayanan dasar, sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		2.656.995.906	1.677.599.892
I	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.656.995.906	1.677.599.892
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	656.121.000	447.428.540
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	262.356.600	175.930.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	120.602.000	73.371.352
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	432.716.350	271.170.900
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	218.840.000	170.800.000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	223.645.128	123.461.100
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	126.785.000	54.590.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Dinas Kesehatan	95.784.900	58.518.100

	Hipertensi	dan 12 Puskesmas		
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	92.431.900	47.820.500
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	190.013.428	100.541.250
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	121.802.000	92.832.250
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	115.897.600	61.135.900
Jumlah			2.656.995.906	1.677.599.892

## 2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tabel 2.6  
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Karangasem

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Satu Tahun	Realisasi Capaian sd semester II		
				Realisasi/ pembilang	Sasaran/ penyebut	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	6.916	5.831	84,31
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	6.601	6.292	95,32
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	6.287	6.142	97,69
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	100%	30.400	23.092	75,96
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	60.784	60.113	98,90
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Warga negara usia 15-19 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	255.451	217.680	85,21
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	70.762	58.179	82,22
8	Pelayanan kesehatan	Persentase penderita hipertensi mendapat	100%	42.310	23.025	54,42

	penderita hipertensi	pelayanan kesehatan sesuai standar				
9	Pelayanan kesehatan penderita diabtes melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	3.393	3.687	108,66
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	1.268	1.168	92,11
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	3.143	1.118	35,57
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human mmunodeficienc y virus = HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	7.804	5.578	71,48

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber daya manusia/dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian bidang kesehatan tahun 2022 berdasarkan jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Dukungan Personil Pemenuhan Bidang Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil yang terlibat Dalam penerapan/ pencapaian SPM
1	2	3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dokter SPOG, dr Interna, Bidan, Perawat, Nutrizionis, analis, promkes, kader
2	Pelayanan kesehatan ibubersalin	Dokter SPOG, dokter SPA, Anastesi dr Interna Bidan, Perawat, analis.
3	Pelayanan kesehatan bayi barulahir	Dokter Spesialis, dokter umum, Bidan, Perawat, Nutrizionis, kader
4	Pelayanan kesehatan balita	Dokter Spesialis, dokter umum, Bidan, Perawat, Nutrizionis, kader
5	Pelayanan kesehatan pada usiapendidikan dasar	Dokter, bidan perawat, perawat gigi, Promkes, Petugas Gizi, Guru sekolah, Kader
6	Pelayanan kesehatan pada usiaproduktif	Seluruh Nakes di Puskesmas
7	Pelayanan kesehatan pada usialanjut	Dokter, bidan perawat, perawat gigi, Promkes, Petugas Gizi, analis kader

8	Pelayanan kesehatan penderitahipertensi	Seluruh Nakes di Puskesmas
9	Pelayanan kesehatan penderitadiabetes melitus	Seluruh Nakes di Puskesmas
10	Pelayanan kesehatan orangdengan gangguan jiwa	Seluruh Nakes di Puskesmas
11	Pelayanan kesehatan orangdengan TB	TIM TB DOTS puskesmas yang terdiri dari pemegang program, klinisi, laboratorium, promkes dan kader kurang lebih sebanyak 80 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Pemegang program, konselor, klinisi, laboratorium dan kader kurang lebih sebanyak 63 orang

#### 4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang ada dalam penerapan dan pencapaian bidang kesehatan di Kabupaten Karangasem tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Petugas kesehatan masih fokus pada vaksinasi booster covid-19 sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
2. Data layanan masyarakat yang terlayani di luar karangasem tidak lagi dikembalikan dandilaporkan lagi sehingga mengurangi jumlah pelayanan yang dilaporkan.
3. Sasaran merupakan data proyeksi sehingga memungkinkan kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Target penduduk yang perlu diskruining dan penduduk yang diberikan pelayanan relatif tinggi.
4. Kurangnya jumlah sumber daya manusia Kesehatan. Pengelola Program Puskesmas masih merangkap beberapa tugas lainnya.
5. Alat dan bahan untuk skrining terbatas. BMHP belum diadakan di awal tahun.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal. Belum semua warga negara usia 60 tahun keatas yang mau memeriksakan kesehatannya ke fasyankes.
7. Belum semua ibu hamil yang kontak ke fasyankes pada trimester pertama kehamilannya.
8. Tidak semua balita yang sudah selesai mendapatkan imunisasi dasar hadir ke fasyankes untuk melakukan skrining pemantauan tumbuh kembang anak.

9. Masih ada stigma yang kurang baik dari masyarakat untuk penderita HIV.
10. Dukungan dan peran serta masyarakat masih kurang terhadap upaya preventif dan promotif.
11. Belum adanya keterbukaan masyarakat sehingga petugas sulit untuk menemukan kasus.
12. Penemuan dan penjangkauan suspek belum optimal disebabkan karena investigasi kontak belum optimal.
13. Di Kabupaten Karangasem tidak ada LSM yang bertindak sebagai penjangkauan sehingga keberadaan kelompok-kelompok kunci tidak diketahui.

Solusi yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang timbul antara lain :

1. Melakukan pelayanan melalui kunjungan rumah.
2. Berkoordinasi dengan pusat dan Provinsi terkait alat dan bahan untuk pelayanan SPM.
3. Setelah mencermati Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 7 ayat (1) berbunyi Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga di Tahun 2023 yang menjadi target pelayanan dasar bidang kesehatan adalah masyarakat miskin
4. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi serta meningkatkan peran serta lintas sektor dan lintas program.
5. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia.
6. Melakukan pendampingan bagi penderita HIV.
7. Menggalakkan kembali posbindu.
8. Mengoptimalkan pelayanan didalam dan luar gedung.

## c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 1. Program dan Kegiatan

Pada urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, melaksanakan 2 pelayanan dasar, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8  
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran		
				Target APBD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk yang terakses air minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.749.794.371,00	7.638.020.200,00	98,55
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	7.749.794.371,00	7.638.020.200,00	98,55
			Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	760.468.001,00	672.102.250,00	88,38
			Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.981.241.370,00	6.960.206.850,00	99,70
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	8.085.000,00	5.711.100,00	70,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase penduduk yang terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.902.200.200,00	2.880.996.240,00	99,26
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem	298.236.000,00	291.371.840,00	97,70

			Pengelolaan Air Limbah Domestik			
			Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman	2.603.964.200,00	2.603.964.200,00	99,45

## 2. Tingkat Capaian Urusan Wajib

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Tabel 2.9  
Realisasi Capaian Urusan Wajib Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/Indikator Kinerja	Tahun	Target SPM	Capaian Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (jiwa)	2022	97,5 %	519.253	505.949	97,44 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (KK)	2022	92,5 %	141,626	127.523	94,84 %

Target pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2022 adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam mencapai SPM selama kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu sebesar 100%. Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2022 merupakan perbandingan antara realisasi kegiatan dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dari Target RENJA TA. 2022 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 95 % terealisasi 97,44%. Sedangkan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 92,5% terealisasi 93,84%, bertambah 1 % dari tahun sebelumnya.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam Penerapan dan Pencapaian bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dukungan personil terdiri dari pegawai ASN dan Non ASN dengan jumlah sebagai berikut :

- a. ASN = 11 Orang
- b. Non ASN = 19 Orang

Dari jumlah 30 orang tersebut, 1 orang ASN adalah pejabat struktural, 3 orang ASN Pejabat Fungsional, 2 orang ASN dan 3 orang Non ASN staf teknis, 3 orang ASN dan 4 Orang non ASN staf administrasi, 2 Orang ASN dan 12 orang non ASN staf lapangan.

### 4. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem antara lain :

1. Belum tercapainya target akses 100% air minum dalam layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai target nasional, hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang disesuaikan dalam perhitungan capaian akses tahun 2022.
2. Belum adanya data base air minum secara menyeluruh sebagai acuan pembangunan lebih lanjut
3. Belum tercapainya target layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Untuk pertama kalinya pelaksanaan kegiatan (DAK dan BKK) dilakukan dengan metode atau cara swakelola sehingga perlu pelibatan masyarakat langsung sesuai target nasional.



5. Keterbatasan SDM dalam melaksanakan program dan kegiatan.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung penanganan akhir limbah domestik untuk pelayanan di permukiman pada jalan sempit dan peralatan petugas operasional (APD, pompa genset) serta gedung petugas pengelola IPLT.
7. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi untuk mendukung capaian target kabupaten

b. Solusi

1. Membuat data base kebutuhan layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di kabupaten sehingga memudahkan untuk memetakan kegiatan setiap tahunnya.
2. Berkoordinasi lebih intens dengan instansi yang mendukung pemenuhan SPM air minum dan sanitasi untuk selalu memperbaharui (*update*) data sehingga dapat meningkatkan prosentase layanan.
3. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan PDAM untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi untuk meningkatkan pola hidup sehat untuk membangun sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.
4. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam permohonan bantuan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi di pemerintahan kabupaten.

**d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

1. Program dan Kegiatan

Urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten Kota	Rp.36.585.600
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Pemerintah Daerah	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.36.585.600</b>

## 2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

**Tabel 2.11**  
**Pencapaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan & rehaibitasi rumahyglayakhuni bagikorbanbencana Kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumahlayak huni	295	KK	100%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerahkabupaten kota	jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumahyang layak huni	-	-	-

## 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Khususnya di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai**

<b>NO</b>	<b>JENIS/KUALIFIKASI</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ASN	9
	Eselon	
	a. III.b	1
	b. IV.a	-
	c. IV.b	-
	Jabatan Fungsional	3
	Jabatan Pelaksana	5
2	Non ASN	15
3	Jenjang Pendidikan	
	a. S2	2
	b. S1/DIV	11
	c. DIII	1
	d. SMA sederajat	9
	e. SLTP Sederajat	1

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, khususnya Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, selaku Dinas Teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan mempunyai personil baik secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 2 Orang dan tenaga non teknis sebanyak 22 Orang perbandingan jumlah tenaga teknis dan non teknis ini belum sesuai dengan kebutuhan, dimana kebutuhan yang ideal adalah 50 % untuk tenaga teknis dan 50 % non teknis.

#### 4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi, urusan serta solusi pemecahannya. Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### 1) Permasalahan

- (1) Masih kurangnya tenaga yang dimiliki di Bidang Perumahan, sehingga Data SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota belum bisa

tertangani secara maksimal, dan untuk penanganan bencana pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada BPBD.

- (2) Belum disediakannya anggaran dari APBD. Berkaitan dengan Perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban bencana
- (3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menata lingkungannya.

## 2) Solusi

- (1) Diharapkan agar hal terkait Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota diarahkan ke BPBD Kabupaten Karangasem selaku leading sektor untuk penanganan bencana daerah
- (2) Melakukan sosialisasi agar selalu menjaga dan menata lingkungan perumahan dan permukiman Hal lain yang perlu dilaporkan

### **e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) OPD yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

#### 1. Program dan Kegiatan

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan pembinaan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di tempat usaha. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mengawasi dan memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk melengkapi usaha yang dijalani dengan IMB, SITU, SIUP dan ijin lingkungan serta melengkapi data identitas pramusaji.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2022 melaksanakan 2 pelayanan dasar, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.13**  
**Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas (BPBD)**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
						(Rp)	%	
1	2	3	4	5	8	9	10	
1	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan informasi peringatan dini dari 11 ancaman bencana di wilayah karangasem yang tersampaikan	383.663.050	374.410.065	97,59
			2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah proposal bantuan bencana yang terfasilitasi dan terverifikasi	156.563.000	153.646.900	95,74
2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	3	Respon cepat darurat bencana	Jumlah kejadian yang dapat ditangani sesuai target respon time 1x24 jam	1.845.886.901	1.623.975.251	87,77
Jumlah total						2.386.112.951	2.152.032.216	92,21

Dinas pemadam Kebakaran pada tahun 2022 melaksanakan 2 pelayanan dasar, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
**Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas (DISDAMKAR)**

No.	Program Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.640.790.000	3.419.847.195	93,93
1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.269.514.000	3.131.272.005	95,77
	a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.434.760.500	1.331.220.185	92,78
	b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	28.475.100	27.854.600	97,82
	c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.614.975.000	1.584.619.170	98,12
	d. Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	191.303.400	187.578.050	98,05
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	371.276.800	310.975.190	83,76
	a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	371.276.800	310.975.190	83,76

## 2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Target pencapaian bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Karangasem belum mencapai target Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutut Pelayanan Dasar Sub urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis di lapangan dan semoga di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Di tahun 2022 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum sesuai dengan amanat dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada. Berikut tabel indikator kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, target dan realisasinya.

**Tabel 4.15**  
**Target dan Realisasi SPM Satpol PP Karangasem Tahun 2022**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN					
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Cakupan Penegakan Perda dan Perkada					
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu	Target	Batas Waktu	KET.
		Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara		Setiap Tahun	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
		5.784	100%	Triwulan I 2021	5.784 (100%)	Triwulan I 2021	
		2.002	100%	Triwulan II 2021	2.002 (100%)	Triwulan II 2021	
		2.330	100%	Triwulan III 2021	2.330 (100%)	Triwulan III 2021	
		2.246	100%	Triwulan IV 2021	2.246 (100%)	Triwulan IV 2021	
		2. Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					
		a.	Banyaknya kelompok patroli di	45			

		kalikan tiga kali patroli dalam sehari				
	b.	Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)	8			
	3. Cakupan rasio petugas Sat Linmas					
	a.	Jumlah Satuan Linmas	2.353 Orang			
	b.	Jumlah RT/ Br.Dinas	529 Br. Dinas			

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana, telah memasukan target SPM pada RPJMD dan RKPD namun dalam penganggarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karangasem. Target capaian indikator kinerja dan keuangan Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.16  
Target dan Realisasi SPM BPBD Kab. Karangasem Tahun 2022

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Kegiatan ini belum mendapat alokasi anggaran dari APBD	Kegiatan ini belum mendapat alokasi anggaran dari APBD
2	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	535.357.625	528.056.965
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	1.845.886.901	1.623.975.251

Di Tahun 2022 ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan amanah dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dengan segala keterbatasan yang ada.



Target SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.17**  
**Target dan Realisasi SPM Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Karangasem Tahun 2022**

NO.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR	TUNTAS MADYA			86,19%	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				86,19%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	522.217	522.217	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				6,19%	
	B. JUMLAH MUTU BARANG/JASA/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	30,96 %	
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	37	4	33	10,81 %	
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	20	3	17	15,00 %	
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	178	0	178	0,00 %	

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

#### a. Satpol PP

Adapun dukungan personil/pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem terhitung 31 Desember 2022 adalah 165 orang, terdiri dari 92 orang PNS, dan 73 orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak).

Menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pasca Sarjana (S2) : 4 orang
2. Sarjana (S1) : 26 orang
3. Diploma (DIII) : - orang
4. SLTA : 135 orang
5. SMP : 1 orang
6. SD : 1 orang

Jumlah tenaga PNS menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pegawai golongan IV : 4 orang
2. Pegawai golongan III : 37 orang
3. Pegawai golongan II : 48 orang
4. Pegawai golongan I : 2 orang

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Personil/ Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem didominasi oleh tingkat SLTA 81,8%, kemudian S1 sebanyak 15,75% dan S2 sebanyak 2,42%.

**b. BPBD**

BPBD Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 didukung oleh Personil sebanyak 92 orang yang terdiri dari 24 orang PNS dan 68 orang pegawai kontrak. Dari 68 orang tenaga kontrak tersebut. Terbagi dalam penugasan sebagai tim reaksi cepat (TRC) BPBD sebanyak 24 orang, Balawista sebanyak 11 orang, tim early warning system (ESW) sebanyak 6 orang, sebagai driver 2 orang, sisanya sebagai tenaga administrasi.

**c. Dinas Pemadam Kebakaran**

Adapun dukungan personil/ pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2022 adalah 63 orang, terdiri dari 8 orang ASN, dan 55 orang Pegawai Non ASN (tenaga kontrak). Dari jumlah 63 orang tersebut, 50 orang diantaranya adalah petugas pemadam kebakaran.

**4. Permasalahan dan Solusi**

**a. Satpol PP**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

1. Masih kurangnya personil PPNS

Solusi: Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan Penindakan, Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran PERDA.

2. Untuk optimalisasi tugas SATLINMAS dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat di dukung oleh bidang yang mewadahi SATLINMAS, guna memonitoring tugas kegiatan SATLINMAS.

Solusi :

- Perlu di bentuk Bidang Yang Mewadahi (SATLINMAS)

**b. BPBD**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah :

1. Belum terlaksananya perhitungan kebutuhan secara lengkap karena dokumen pokok yang akan dijadikan acuan belum lengkap.
2. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan : (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat, (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan konperhensif, (3) Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.
4. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi pemerintah/ Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media masa dan masyarakat.

5. Kurangnya sarana prasarana Gudang, Gedung Pusdalops, Peralatan Pusdalops, Peralatan Gudang, Peralatan Penanganan Bencana (alat berat, kendaraan pertolongan)
6. Kurangnya APD Petugas
7. Kurang terlatihnya petugas

Beberapa Solusi yang sudah dan akan ditempuh antara lain:

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka diharapkan Badan Penanggulangan Bencana dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana.
2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
3. Segera disusun SOP Penanggulangan Bencana sehingga menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
5. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerja sama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
7. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
8. Penyediaan dana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan resiko bencana;
10. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan resiko bencana komprehensif dan sistematis ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

c. Dinas Pemadam Kebakaran

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran antara lain :

1. Belum bisa mengumpulkan data sesuai dengan by name by adress karena kondisi di tempat kejadian peristiwa ketika terjadi kebakaran sangat panik sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data.
2. Masih sulitnya mengintegrasikan indikator layanan terutama menghitung persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
3. Masih adanya rasionalisasi anggaran, semua Perangkat Daerah juga kena termasuk pengampu urusan wajib.
4. Sistem perencanaan dan penganggaran program, kegiatan, sub kegiatan belum murni berbasis SPM, karena masih melihat anggaran sebelumnya tanpa melihat urgensi dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah apalagi pengampu SPM.
5. Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan sumber daya aparatur pemadam kebakaran.
6. Pelaksana kegiatan tidak pernah fokus dalam mengikuti rapat koordinasi (melalui zoom meeting) sehingga tidak paham ketika dimintai data yang dibutuhkan.

Solusi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dilakukan adalah :

1. Pengumpulan data ulang ke lokasi kejadian kebakaran.
2. Perlu adanya bimbingan teknis kepada pelaksana kegiatan dan sub kegiatan tentang pengisian data pemenuhan SPM.
3. Perlu adanya kesepakatan untuk tidak melakukan rasionalisasi anggaran bagi pengampu SPM.
4. Dalam perencanaan pembangunan daerah mestinya alokasi anggaran diprioritaskan bagi pengampu SPM.

5. Pelaksana kegiatan agar lebih disiplin dalam mengikuti setiap kegiatan rapat teknis yang diberikan oleh Kemendagri, untuk itu perlu komitmen bersama guna meningkatkan capaian penerapan SPM.

## **f. Sosial**

### **1. Program dan Kegiatan**

Untuk melaksanakan urusan wajib Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem. dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.18**  
**Program dan Kegiatan Urusan Sosial**

No.	Program Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.640.790.000	3.419.847.195	93,93
	1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.269.514.000	3.131.272.005	95,77
	e. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.434.760.500	1.331.220.185	92,78
	f. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	28.475.100	27.854.600	97,82
	g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.614.975.000	1.584.619.170	98,12
	h. Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	191.303.400	187.578.050	98,05
	2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	371.276.800	310.975.190	83,76
	b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	371.276.800	310.975.190	83,76

### **2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib**

Di Tahun 2022 ini Dinas Sosial Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dengan segala keterbatasan yang ada. Target dan realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.19**  
**Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian (%)
			<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum terlayani</i>	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial -Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20	6	14	30%
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial -Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	30 orang	30 orang	-	100%
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial -Penyediaan Permakanan	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	300	273	27	91%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial -Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	300 orang	217 orang	83 orang	72 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota -Penyediaan Makanan	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	175 orang	73 orang	102 orang	42%

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Adapun dukungan personil/ pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022 untuk urusan sosial adalah 9 orang, terdiri dari 2 orang PNS, dan 7 orang Pegawai Non PNS (tenaga kontrak).

### 4. Permasalahan dan Solusi

#### 1. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
- 2) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- 3) Permohonan bantuan sosial belum sesuai dengan Mekanisme Perbup. 26 tahun 2022
- 4) Sub. Kegiatan Penyediaan Makanan merupakan penanganan terhadap bencana yang tidak bisa diprediksi sehingga pelaksanaannya pun tidak bisa direncanakan.
- 5) Permohonan dari penerima manfaat setahun sebelumnya akan tetapi Realisasi bantuan sosial setahun setelah permohonan diterima, karena harus melalui proses verifikasi ulang terkait keadaan penerima manfaat dan selanjutnya akan dipakai acuan dalam penyusunan SK Bupati Sesuai dengan Perbup 26 Tahun 2021 sehingga penerima rentan mengalami hal yang tidak diinginkan (Meninggal Dunia).

#### Solusi

- 1) Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar secara bertahap kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
- 3) Untuk mempercepat pelayanan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan seluruh tenaga administrasi Non ASN yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada sehingga kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Minimal bisa berjalan normal.
- 5) Melaksanakan Verifikasi lapangan terkait permohonan atau usulan bantuan sosial untuk dapat membuatkan SK Penerima manfaat.





**BAB III**  
**EVALUASI PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN**  
**OPINI LAPORAN KEUANGAN**

**1. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD)**

**A. Pelaksanaan Evaluasi**

1. Sesuai ketentuan pasal 9 PP Nomor 3 tahun 2007, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada Pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi, penerimaan LPPD Tahun 2021 Kabupaten Karangasem diterima tepat waktu pada tanggal 28 Maret 2022.
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli sampai dengan 12 Agustus 2022;
3. Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SI LPPD.
4. Berdasarkan hasil evaluasi atas data yang disajikan dalam LPPD Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Tim Daerah/Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada umumnya cukup baik namun masih banyak data yang harus disempurnakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan elemen data untuk masa yang akan datang.
5. Validasi dan Klarifikasi untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 dari Tim Pusat Kementerian Dalam Negeri tidak terlaksana pada Tahun 2022.

## B. Hasil Evaluasi Tim Daerah Inspektorat Provinsi Bali

### 1. Hasil Evaluasi Tim Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
CAPAIAN MAKRO DAERAH	1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020	67,35	0,01	67,35	0,01	Tetap			
			Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021	67,36		67,36					
	2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan Tahun 2020	5,91	-14,72	5,91	-14,72	Tetap			
			Angka Kemiskinan Tahun 2021	6,78		6,78					
	3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	Angka Pengangguran Tahun 2020	2,42	4,13	2,42	4,13	Tetap			
			Angka Pengangguran Tahun 2021	2,32		2,32					
	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun 2020	(4,45)	87,42	-4,45	87,42	Tetap			
			Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun 2021	(0,56)		-0,56					
	5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Per Kapita Tahun 2020	25,41	-16,96	25,41	-16,96	Tetap			
			Pendapatan Per Kapita Tahun 2021	21,10		21,10					
	6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2020	0,33	2,14	0,33	2,14	Tetap			
			Ketimpangan Pendapatan	0,32		0,32					

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			Tahun 2021								
<b>PENDIDIKAN</b>	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	4.296,00	34,57	4.296,00	34,57	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	12.428,00		12.428,00					
	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	40.084,00	98,96	40.084,00	98,96	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	40.504,00		40.504,00					
	1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	16.669,00	82,53	16.669,00	82,53	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	20.197,00		20.197,00					
	1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	871,00	1,05	871,00	1,05	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Jumlah anak usia 7-18 tahun	82.596,00		82.596,00					

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan								
KESEHATAN	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/rota	380,00	0,90	380,00	0,90	Tetap			
			Jumlah penduduk di kabupaten/rota	420.832,00		420.832,00					
	1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	3,00	100,00	3,00	100,00	Tetap			
			Jumlah RS di kabupaten/rota	3,00		3,00					
	1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.204,00	89,72	6.204,00	89,72	Tetap			
			Jumlah ibu hamil di kabupaten/rota	6.915,00		6.915,00					
	1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	6.716,00	104,11	6.716,00	104,11	Tetap			
			Jumlah ibu bersalin di kabupaten/rota	6.451,00		6.451,00					
	1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan	6.531,00	107,28	6.531,00	107,28	Tetap			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
		kehatan bayi baru lahir	kehatan sesuai standar								
			Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kot a	6.088,00		6.088,00					
	1.b.6	Cakupan pelayanan kehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kehatan sesuai standar	22.853,00	93,62	22.853,00	93,62	<b>Tetap</b>			
			Jumlah balita di kabupaten/kot a	24.411,00		24.411,00					
	1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kehatan sesuai standar	57.006,00	92,28	57.006,00	92,28	<b>Tetap</b>			
			Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kot a	61.773,00		61.773,00					
	1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kehatan sesuai standar	211.918,00	83,66	211.918,00	83,66	<b>Tetap</b>			
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kot a	253.300,00		253.300,00					
	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kehatan sesuai standar	44.055,00	64,34	44.055,00	64,34	<b>Tetap</b>			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kot a	68.468,00		68.468,00					
	1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51.993,00	59,91	51.993,00	59,91	<b>Tetap</b>			
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kot a	86.791,00		86.791,00					
	1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.044,00	91,35	4.044,00	91,35	<b>Tetap</b>			
			Jumlah penderita DM di kabupaten/kot a	4.427,00		4.427,00					
	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.140,00	90,84	1.140,00	90,84	<b>Tetap</b>			
			Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kot a	1.255,00		1.255,00					
	1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan	895,00	31,24	895,00	31,24	<b>Tetap</b>			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			sesuai standar								
			Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	2.865,00		2.865,00					
	1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	5.960,00	77,41	5.960,00	77,41	<b>Tetap</b>			
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	7.699,00		7.699,00					
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	258,11	6,95	258,11	6,95	<b>Tetap</b>			
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	3.713,75		3.713,75					
	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan	116.300,00	0,29	116.300,00	0,29	<b>Tetap</b>			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			kabupaten/kota (ha)								
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	39.844.390,00		39.844.390,00					
	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha)	2,15	0,15	2,15	0,15	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah sesuai	
			luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	1.403,83		1.403,83					
	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	455.413,00	96,52	455.413,00	96,52	<b>Tetap</b>			
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	471.820,00		471.820,00					



FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			a tersebut								
	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	127.268,00	90,08	127.268,00	90,08	<b>Tetap</b>			
			Jumlah rumah di kabupaten/ kota	141.281,00		141.281,00					
	1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	2.316,00	100,00	2.316,00	100,00	<b>Tetap</b>			
			Jumlah IMB yang berlaku	2.316,00		2.316,00					
	1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	852,27	70,87	852,27	70,87	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/ kota	1.202,54		1.202,54					
	1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	25,00	83,33	25,00	83,33	<b>Tetap</b>			
			Jumlah								

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	30,00		30,00					
	1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	95,00	100,00	95,00	100,00	Tetap			
			jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	95,00		95,00					
PERUMAHAN	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	331,00	100,00	331,00	100,00	Tetap			
			jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	331,00		331,00					
	1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	179,00	100,00	179,00	100,00	Tetap			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	179,00		179,00					
	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	8,68	69,93	8,68	69,93	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah sesuai	
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	12,41		12,41					
	1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	10.859,00	9,46	10.859,00	9,46	<b>Tetap</b>			
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kot a	114.781,00		114.781,00					
	1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	37,00	100,00	37,00	100,00	<b>Tetap</b>			
			Jumlah unit perumahan kabupaten/kot a	37,00		37,00					
<b>TRANTIBUMLINM AS</b>	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	70,00	100,00	70,00	100,00	<b>Tetap</b>			
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	70,00		70,00					
	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat	11,00	100,00	11,00	100,00	<b>Tetap</b>			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			sanksi yang ditegakkan								
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	11,00		11,00					
	1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	423.058,00	tdi	423.058,00	tdi	Tetap			
			Jumlah sasaran yang seharusnya menerima informasi rawan bencana							Data dukung sudah sesuai, pada sistem LPPD tidak ada permintaan data penyebut	
	1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	522.217,00	tdi	522.217,00	tdi	Tetap			
			Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							Data dukung sudah sesuai, pada sistem LPPD tidak ada permintaan data penyebut	
	1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	141,00	salah telong cek	16,00	tdi	Berubah		Salah input pada dokumen pembilang dan Rumusan KKE tidak sama	
			Jumlah sasaran								

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8,00		-					
	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	19,00	26,76	19,00	26,76	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah sesuai	
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	71,00		71,00					
	1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari	27,41	27,41	27,41	27,41	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah sesuai	

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
		kebakaran	pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran								
SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	41,00	0,64	41,00	0,64	Tetap		Data dukung sudah dilengkapi	
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	6.455,00		6.455,00					
	1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	124,00	87,94	124,00	87,94	Tetap			
			populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	141,00		141,00					

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			kabupaten kota								
KETENAGAKERJAN	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	32,00	94,12	32,00	94,12	Tetap			
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	34,00		34,00					
	2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	2.481,00	12,39	2.481,00	12,39	Tetap			
			Jumlah tenaga kerja keseluruhan	20.021,00		20.021,00					
	2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	10.635.789.000.000,00	531231656,76	10.635.789.000.000,00	531231656,76	Tetap			
			Jumlah tenaga kerja	20.021,00		20.021,00					
	2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	1.418,00	36,43	1.418,00	36,43	Tetap			
			Jumlah perusahaan	3.892,00		3.892,00					
	2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	929,00	80,50	929,00	80,50	Tetap		Data dukung sudah sesuai	
			Jumlah pencari kerja yang	1.154,00		1.154,00					

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
		Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	terdaftar								
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	193.977.750,00	0,04	193.977.750,00	0,04	Tetap			
			Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	518.029.808.135,00		518.029.808.135,00					
	2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	14,00	0,01	14,00	0,01	Tetap			
			Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	148.349,00		148.349,00					
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	15,00	5,81	15,00	5,81	Tetap		Data dukung halaman 2 sudah jelas		
		Jumlah penduduk perempuan	258.212,00		258.212,00						
PANGAN	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	79.270,91	138,78	79.270,91	138,78	Tetap			
			Jumlah kebutuhan pangan	57.118,60		57.118,60					
PERTANAHAN	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi	153.653,00	100,00	153.653,00	100,00	Tetap			
			Seluruh luas								



FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
		tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi	153.653,00		153.653,00					
	2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-	tdi	-	tdi	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani secara elektronik	
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-		-					
	2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	153.653,00	100,00	153.653,00	100,00	Tetap			
			Luas izin lokasi yang diterbitkan	153.653,00		153.653,00					
	2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	1,00	11,11	1,00	11,11	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani secara elektronik	
			Jumlah penerima tanah obyek landreform	9,00		9,00					
	2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah luas izin	-	tdi	-	tdi	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani secara elektronik	

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			membuka tanah yang diterbitkan	-		-					
	2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	2,00	100,00	2,00	100,00	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani secara elektronik	
			Jumlah pengaduan sengketa tana garapan	2,00		2,00					
LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kot a	66,27	66,27	66,27	66,27	Tetap			
	2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	1.322.055,45	59,01	1.322.055,45	59,01	Tetap			
			Total volume timbunan sampah kabupaten/kot a	2.240.254,10		2.240.254,10					
	2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kot a	-	0,00	-	0,00	Tetap			
			usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	25,00		25,00					
ADMINDUKCAPIL	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan	374.497,00	98,86	374.497,00	98,86	Tetap			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf	
			perekaman Jumlah penduduk wajib KTP-el	378.813,00		378.813,00						
	2.r.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	30.634,00	21,36	30.634,00	21,36	Tetap				
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	143.418,00		143.418,00						
	2.r.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	146.628,00	93,59	146.628,00	93,59	Tetap				
			Jumlah anak usia 0-18 tahun	156.677,00		156.677,00						
	2.r.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	9,00	22,50	9,00	22,50	Tetap				
			Jumlah PD	40,00		40,00						
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	-	tdi	-	tdi	Tetap		Ada Surat Keterangan	
				Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	-		-					
		2.1.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per	2,00	22,22	2,00	22,22	Tetap			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun								
			Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	9,00		9,00					
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2,39	2,39	2,39	2,39	Tetap		Data dukung sudah dicap dan ditandatangani	
	2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	76.406,00	85,75	76.406,00	85,75	Tetap		Data dukung sudah dicap dan ditandatangani	
			Jumlah pasangan usia subur	89.103,00		89.103,00					
	2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	12.697,00	14,25	12.697,00	14,25	Tetap		Data dukung sudah dicap dan ditandatangani, agar distabilo data yang dimaksud.	
Jumlah Pasangan Usia Subur			89.103,00		89.103,00						
PERHUBUNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	77.78	77.78	77.78	77.78	Tetap			
	2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,60	0,60	0,60	0,60	Tetap			
KOMINFO	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	53,00	100,00	53,00	100,00	Tetap			
			Jumlah PD	53,00		53,00					
	2.o.2	Persentase Layanan Publik	Jumlah layanan publik	-	tdi	-	tdi	Tetap		Ada Surat Keterangan	

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
		yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	diselenggarakan secara online dan terintegrasi								
			Jumlah layanan publik	-		-					
	2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	475.103,00	90,98	475.103,00	90,98	Tetap			
			Jumlah penduduk	522.217,00		522.217,00					
KOPERASI DAN UKM	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	158,00	69,60	158,00	69,60	Tetap			
			Jumlah seluruh koperasi	227,00		227,00					
	2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	415,00	0,82	415,00	0,82	Tetap		Data dukung sudah dicap dan ditandatangani	
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	50.717,00		50.717,00					
PENANAMAN MODAL	2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2020	259.778.669.265,00	-49,54	259.778.669.265,00	-26,09	Berubah		Ada perubahan data dukung penyebut dari 131.084.028.743 menjadi 192.011.049.006	
			Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2021	131.084.028.743,00		192.011.049.006,00					
KEPEMUDAAN	2.r.1	Tingkat partisipasi	Jumlah pemuda		0,04		0,04	Tetap			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
DAN OLAHRAGA		pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kot a	30,00		30,00					
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kot a	84.848,00		84.848,00					
	2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kot a	78,00	0,09	78,00	0,09	Tetap			
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kot a	84.848,00		84.848,00					
	2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	-	0,00	-	0,00	Tetap		Ada Surat Keterangan.	
	STATISTIK	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	tdi	52,00	100,00	Berubah		Data dukung sudah sesuai
Jumlah PD						52,00					
2.s.2		Persentase PD yang menggunakan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik	-	tdi	52,00	100,00	Berubah		Data dukung sudah sesuai	

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
		data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah PD			52,00					
<b>PERSANDIAN</b>	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian	-	tdi	-	tdi	Tetap		Data dukung sudah sesuai	
<b>BUDAYA</b>	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang terdata	70,00 367,00	19,07	70,00 367,00	19,07	Tetap			
<b>PERPUSTAKAAN</b>	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	-	0,00	-	0,00	Tetap		Ada Surat Keterangan	
	2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	-	0,00	-	0,00	Tetap		Ada Surat Keterangan	
<b>KEARSIPAN</b>	2.w.1	Tingkat	Tingkat		64,50		64,50	Tetap			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
		ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab an nasional	ketersediaan arsip	64,50		64,50					
	2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	17,00	17,00	17,00	17,00	<b>Tetap</b>			
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kot a	26463.75	<b>tdi</b>	26.463,75	<b>tdi</b>	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah sesuai	
			Target Produksi Perikanan Mengacu Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a								
<b>PARIWISATA</b>	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2020	171.353,00	-99,40	171.353,00	-99,40	<b>Tetap</b>			
			Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021	1.032,00		1.032,00					



FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf	
	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun 2020	368.570,00	-98,84	368.570,00	-98,84	Tetap				
			Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021	4.269,00		4.269,00						
	3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	80,00	2,11	80,00	2,11	Tetap				
			Jumlah kamar yang tersedia	3.794,00		3.794,00						
	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.378.240.400.000,00	tdi	1.378.240.400.000,00	tdi	Tetap		Data dukung sudah sesuai		
			Total PBRB harga berlaku									
	3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	2.444.514.912,00	0,97	2.444.514.912,00	0,97	Tetap		Data dukung sudah sesuai		
			Jumlah total PAD (Realisasi)	252.771.783.068,16		252.771.783.068,16						
	PERTANIAN	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	164.069,97	7,08	164.069,97	7,08	Tetap		Data dukung sudah sesuai	
				Luas Panen	23.158,19		23.158,19					
3.c.2		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2020	10.036,00	13,26	10.036,00	13,26	Tetap		Data dukung sudah sesuai		
			Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021	8.705,00		8.705,00						
KEHUTANAN	3.d			-	100,00		100,00	Tetap				
ESDM	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	-	tdi	-	tdi	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap		

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	-		-					
PERDAGANGAN	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	-	tdi	-	tdi	Tetap		Ada Surat Keterangan	
			Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kot a	-		-					
	3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	5.444,00	39,36	5.444,00	39,36	Tetap			
			Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	13.832,00		13.832,00					
	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	427,00	4,90	427,00	4,90	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kot a	8.716,00		8.716,00					
PERINDUSTRIAN	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2020	14.875,00	-14,43	14.875,00	-14,43	Tetap		Data dukung sudah sesuai dengan SILPPD	
			Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021	12.729,00		12.729,00					
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri	-	0,00	-	0,00	Tetap		Ada Surat Keterangan	

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
		turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK								
	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	18,00 18,00	100,00	20,00 20,00	100,00	Tetap		Data dukung sudah sesuai.	
	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	- -	tdi	- -	tdi	Tetap		Ada Surat Keterangan	
	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	- -	tdi	- -	tdi	Tetap		Ada Surat Keterangan	
	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	12.729,00	12729,00	12.729,00	12729,00	Tetap		Data dukung sudah sesuai	
<b>TRANSMIGRASI</b>	3.h	-			<b>BUP</b>	-	<b>BUP</b>	<b>Tetap</b>			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
<b>PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	234.366.836.045,66	15,22	234.366.836.045,66	15,22	<b>Berubah</b>		Data diambil dari Realisasi Belanja 2021	
			Total belanja APBD (Realisasi)	1.539.529.971.632,10		1.539.529.971.632,12					
	4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD (Realisasi)	250.734.664.481,16	1644,37	250.734.664.481,16	1,64	<b>Berubah</b>		Salah input data pada SILPPD	
			Jumlah PDRB Non Migas	15.248.050.000,00		15.248.050.000.000,00					
	4.a.3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Mauritas SPIP	3,00	3,00	3,00	3,00	<b>Tetap</b>			
	4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	3,00	3,00	3,00	3,00	<b>Tetap</b>			
	4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Total Belanja Urusan Pemerintahan	1.179.996.954.639,60	76,65	1.179.996.954.639,60	76,65	<b>Tetap</b>			
Total belanja APBD			1.539.529.971.632,10		1.539.529.971.632,10						
4.a.5	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan 10 Tahun Terakhir	10,00	10,00	10,00	10,00	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah sesuai		
<b>PENGADAAN</b>	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021	-	0,00	-	0,00	<b>Tetap</b>		Data dukung sudah jelas, sudah ditandatangani dan dicap	
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021	86,00		86,00					

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klariifikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
	4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	86,00	3,75	86,00	3,75	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif	2.293,00		2.293,00					
	4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	114.345.557.225,00	6,95	114.345.557.225,00	6,95	Tetap		Data dukung sudah sesuai	
			Total belanja langsung	1.645.990.790.607,20		1.645.990.790.607,20					
	4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2020	66.872.265.085,36	-58,87	66.872.265.085,36	-58,87	Tetap		Sesuai dengan Surat Keterangan	
			Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan	27.506.896.863,64		27.506.896.863,64					

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
			Koperasi Tahun 2021								
KEPEGAWAIAN	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	4.775,00	salah telong cek	952,00	89,22	Berubah		Perubahan data dukung pada pembilang	
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.067,00		1.067,00					
	4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	140,00	7,62	140,00	7,62	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.838,00		1.838,00					
	4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	140,00	100,00	140,00	100,00	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	140,00		140,00					
MANAJEMEN KEUANGAN	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	1.539.529.971.632,12	0,94	1.539.529.971.632,12	0,94	Tetap			
			Total belanja APBD dikurangi satu	1.645.990.790.607,20		1.645.990.790.607,20					
	4.d.2	Deviasi realisasi	Nilai absolut	250.734.664.481,16	0,97		0,97	Tetap			

FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klari fikasi	Panduan / Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
		PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	dari total PAD dalam realisasi			250.734.664.481,16					
			Total PAD dalam APBD dikurangi satu	258.110.008.272,00		258.110.008.272,00					
	4.d.3	Assets Management	Total Assets Management	3,00	3,00	3,00	3,00	Tetap		Data dukung sudah sesuai	
	4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	124.225.313.698,36	8,48	124.225.313.698,36	8,48	Tetap			
			Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1.464.635.320.648,62		1.464.635.320.648,62					
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	1.510.077.736.341,12	91,55	1.510.077.736.341,12	91,55	Tetap			
			Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	1.649.478.457.490,00		1.649.478.457.490,00					
	4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di wensite pemda	12,00	100,00	12,00	100,00	Tetap		Data dukung sudah ditandatangani dan dicap	
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12,00		12,00					

### Permasalahan :

Uraian permasalahan pada saat pelaksanaan evaluasi terkait capaian kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Karangasem, antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan input data pada SI LPPD sehingga capaian kinerja yang dilaporkan tidak sama dengan dokumen pendukung.
2. Terdapat data dukung berupa Surat Keterangan/ Pernyataan belum ditandatangani/dicap pada beberapa urusan , antara lain pada urusan : Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Pengendalian Penduduk dan KB, Koperasi dan UKM, Pariwisata, ESDM, Perdagangan, Perindustrian, Perencanaan dan Keuangan, serta Kepegawaian.
3. Terdapat Data dukung belum lengkap (hanya mencantumkan data pembilang atau penyebut) pada beberapa urusan antara lain urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Trantibumlinmas, Sosial, Ketenagakerjaan, Statistik, Persandian, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perindustrian serta pengadaan.

### Kesimpulan :

Dari uraian permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masih terdapat pemahaman yang kurang dari pengelola data pada masing-masing perangkat daerah terkait definisi operasional Indikator Kinerja Kunci (IKK);
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukung serta dokumen pendukung yang salah telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dengan menyampaikan perbaikan dokumen pendukung pada saat proses klarifikasi.

### Rekomendasi :

1. Melakukan perbaikan data kinerja dan data dukung melalui SI LPPD berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi,
2. Perangkat daerah sebagai pengelola data untuk selanjutnya dalam menyampaikan bukti dukung capaian kinerja agar mempedomani manual penyusunan LPPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



## **2. OPINI LAPORAN KEUANGAN**

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Karangasem berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali, tanggal 13 Mei 2022. Hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga diraih Pemkab Karangasem pada Tahun 2021 atas Laporan Keuangan Tahun 2020.



## **BAB IV RINGKASAN APBD**

### **A. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### **1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) ; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berupa pendapatan Hibah BOS.

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Rencana target PAD Tahun 2022 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya. Langkah optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan pengawasan khususnya pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan menambah/membangun 4 Pos Pengawasan Pajak (Portal) terintegrasi terpadu dengan pelayanan KIR dan samsat.
- (2) Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

(3) Hasil pendapatan BLUD RSUD termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## 2. Pendapatan Transfer

### (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

#### a. Dana Perimbangan terdiri dari :

- Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU tahun 2021 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020.
- Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik didasarkan pada alokasi DAK tahun 2021 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020. Optimalisasi diupayakan dengan memperjuangkan usulan pendanaan kegiatan melalui DAK.

b. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi DID didasarkan pada alokasi tahun 2021 dengan memperhatikan realisasi tahun 2020.

c. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Proyeksi dana desa didasarkan pada alokasi tahun 2021 dengan memperhatikan realisasi tahun 2020.

### 1) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya yang diproyeksikan berdasarkan alokasi tahun 2021 dengan memperhatikan realisasi tahun 2020.

### 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga baik dari badan, lembaga, serta organisasi yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya-upaya antara lain :

- (1) Mengoptimalkan pengawasan pajak daerah khususnya sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan membangun/menambah 4 unit pos pengawasan (portal) terintegrasi dengan pelayanan terpadu Pajak KIR, Retribusi Jembatan Timbang dan Samsat.
- (2) Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta penguatan regulasi.
- (3) Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah.
- (4) Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (5) Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Dengan berlakunya PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Struktur target pendapatan daerah tahun 2021 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Target Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2021</b>	<b>PROYEKSI TAHUN 2022</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.601.867.548.846</b>	<b>1.715.109.162.682</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>258.110.008.273</b>	<b>265.338.055.092</b>
4.1.01	Pajak Daerah	124.436.802.630	117.110.997.500
4.1.02	Retribusi Daerah	15.925.536.000	14.195.189.680
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.260.598.088	9.099.897.759
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	106.487.071.555	124.931.970.153
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.286.885.440.573</b>	<b>1.386.145.942.132</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.143.114.068.000</b>	<b>1.200.650.411.000</b>
<b>1)</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>999.498.267.000</b>	<b>1.051.534.610.000</b>
<b>a.</b>	<b>Dana Transfer Umum :</b>	<b>742.165.624.000</b>	<b>769.909.665.000</b>
	1) Dana Bagi Hasil	18.319.365.000	19.569.365.000
	2) Dana Alokasi Umum	723.846.259.000	750.340.300.000
<b>b.</b>	<b>Dana Transfer Khusus :</b>	<b>257.332.643.000</b>	<b>281.624.945.000</b>
	1) DAK Fisik	101.772.257.000	121.814.559.000
	2) DAK Non Fisik	155.560.386.000	159.810.386.000
<b>2)</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>58.326.553.000</b>	<b>60.076.553.000</b>
<b>3)</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>85.289.248.000</b>	<b>89.039.248.000</b>
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>143.771.372.573</b>	<b>185.495.531.132</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil	102.984.082.047	140.208.240.606
2)	Bantuan Keuangan	40.787.290.526	45.287.290.526

<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>56.872.100.000</b>	<b>63.625.165.458</b>
<b>4.3.03</b>	<b>Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>56.872.100.000</b>	<b>63.625.165.458</b>
1)	Hibah	56.872.100.000	63.625.165.458
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.601.867.548.846</b>	<b>1.715.109.162.682</b>

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026

## **2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran

serta memperjelas keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi :

a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan akses gaji sesuai ketentuan sebesar 2,5 persen. Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi

sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/masyarakat untuk menangani masalah sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun, bencana social serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagikan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak



dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
2. Menjaga stabilitas harga hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung memfasilitasi pemasaran hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca covid-19.

5. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah melalui pemenuhan 25% infrastruktur yang bersumber dari dana transfer yang bersifat umum.
6. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pengawasan (APIP) sebesar 0,3 - 0,9% dari Volume Anggaran APBD Tahun 2022.
7. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
8. Meningkatkan akses jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mencakup minimal 95 % pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC.
9. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber- sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
10. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial khususnya dalam rangka menghadapi bencana baik bencana alam maupun non alam, maka anggaran difokuskan untuk pencegahan, penanggulangan dan ketahanan bencana daerah.
11. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca Covid-19 khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kesempatan kerja.
12. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan untuk peningkatan proporsi ADD yang semula 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi 11,5 persen.
13. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan

budayadaerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.

14. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga tersebut.

Struktur target belanja daerah tahun 2021 dan Proyeksi belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan PP 12 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2  
Target Belanja Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Uraian Belanja</b>	<b>Target Tahun 2021</b>	<b>Proyeksi Tahun 2022</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.645.990.790.608</b>	<b>1.762.636.026.003</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.223.148.886.508</b>	<b>1.226.341.985.616</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	762.640.534.402	768.280.633.510
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.447.044.428	415.750.044.428
5.1.05	Belanja Hibah	19.642.907.678	19.892.907.678
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.418.400.000	22.418.400.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>212.702.105.903</b>	<b>305.196.471.164</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.274.793.775</b>	<b>6.967.864.490</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>199.865.004.422</b>	<b>224.129.704.733</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.247.104.022	17.069.804.333
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	181.617.900.400	207.059.900.400
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.645.990.790.608</b>	<b>1.762.636.026.003</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(44.123.241.762)</b>	<b>(47.526.863.321)</b>

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026

### **3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

#### **A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, adalah : Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

#### **B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan, adalah Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel 3.6. Perkembangan pembiayaan daerah jika dilihat dari sisi penerimaan hanya bergantung pada sisa lebih hasil perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Dari sisi pengeluaran

pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal /investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok hutang.

Tabel 4.3  
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Target Tahun 2021</b>	<b>Proyeksi Tahun 2022</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.123.241.762</b>	<b>50.026.863.321</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	48.123.241.762	50.026.863.321
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>48.123.241.762</b>	<b>50.026.863.321</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	4.000.000.000	2.500.000.000
6.2.03	pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>44.123.241.762</b>	<b>47.526.863.321</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026

## B. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

### - Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.1.576.818.835.558,88 dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.587.473.591.277,00 atau 99,33% dari yang ditargetkan. Secara rinci, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2022

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)
<b>I.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>253.884.957.846,00</b>	<b>301.332.231.354,78</b>	<b>118,69</b>
1	Pajak Daerah	141.910.162.195,00	167.957.909.825,42	118,36
2	Retribusi Daerah	10.412.126.000,00	10.215.719.116,00	98,11
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.620.904.738,00	9.321.192.563,91	96,88
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	91.941.764.913,00	113.837.409.849,45	123,81
<b>II.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.305.565.130.932,00</b>	<b>1.250.668.221.397,00</b>	<b>95,80</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.098.828.749.000,00</b>	<b>1.060.122.783.163,00</b>	<b>96,48</b>
a	Dana Perimbangan	1.011.461.144.000,00	973.346.781.563,00	96,23
b	Dana Insentif Daerah (DID)	9.523.895.000	9.523.895.000,00	100,00
c	Dana Desa	77.843.710.000,00	77.252.106.600,00	99,24
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>206.736.381.932,00</b>	<b>190.545.438.234,00</b>	<b>92,17</b>
a	Pendapatan Bagi Hasil	132.352.597.873,00	113.631.935.158,00	85,86
b	Bantuan Keuangan	74.383.784.059,00	76.913.503.076,00	103,40
<b>III.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>28.023.502.499,00</b>	<b>24.818.382.807,10</b>	<b>88,56</b>
1	Pendapatan Hibah	-	398.546.349,10	-
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.023.502.499,00	24.419.836.458,00	87,14
	<b>JUMLAH =</b>	<b>1.587.473.591.277,00</b>	<b>1.576.818.835.558,88</b>	<b>99,33</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2022, *unaudited*

Tabel diatas menyajikan bahwasannya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu melampaui target yang disesuaikan dalam Perubahan APBD, yaitu terealisasi sebesar Rp.301.332.231.354,78 dari yang ditargetkan sebesar Rp.253.884.957.846,00 atau 118,69%. Sedangkan Dana Transfer dan Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masing-masing terealisasi lebih kecil dari yang ditargetkan (kurang dari 100%).

- Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah setelah sembilan kali mengalami penyesuaian melalui Perubahan Penjabaran APBD, target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5  
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)
<b>I.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.305.343.525.500,04</b>	<b>1.199.153.569.290,31</b>	<b>91,86</b>
1	Belanja Pegawai	777.329.458.273,04	721.933.660.292,55	92,87
2	Belanja Barang dan Jasa	502.653.240.978,00	452.808.260.235,76	90,08
3	Belanja Bunga	-	-	-
4	Belanja Hibah	18.886.426.249,00	18.364.668.762,00	97,24
5	Belanja Bantuan Sosial	6.474.400.000,00	6.046.980.000,00	93,40
<b>II.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>183.107.974.999,00</b>	<b>139.308.067.685,15</b>	<b>76,08</b>
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.641.973.120,00	47.219.074.193,50	84,86
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.950.260.866,00	32.102.107.210,05	80,36
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.781.854.881,00	59.535.424.292,60	68,60
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	733.886.132,00	451.461.989,00	61,52
<b>III</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.123.533.464,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Belanja Tidak Terduga	4.123.533.464,00	-	-
<b>IV</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>210.587.000.850,00</b>	<b>209.850.039.812,00</b>	<b>99,65</b>
1	Belanja Bagi Hasil	21.011.011.030,00	20.875.653.392,00	99,36
2	Belanja Bantuan Keuangan	189.575.989.820,00	188.974.386.420	99,68
	<b>JUMLAH =</b>	<b>1.703.162.034.813,04</b>	<b>1.548.311.676.787,46</b>	<b>90,91</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2022, *unaudited*

Dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.1.703.162.034.813,04 terealisasi sebesar Rp. 1.548.311.676.787,46 atau 90,91%. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah yang realisasinya sangat rendah diantaranya dari Belanja Tak Terduga tidak terealisasi.

- Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 118.188.443.536,00 dan terealisasi sebesar Rp. 118.187.567.945,55 atau 99,99%.

Tabel 4.6  
Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2022

<b>No.</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
<b>I.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>118.188.443.536,00</b>	<b>118.187.567.945,55</b>	<b>99,99%</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	118.188.443.536,00	118.187.567.945,55	99,99%
<b>II.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100%
	<b>Pembiayaan netto =</b>	<b>115.688.443.536,00</b>	<b>115.687.567.945,55</b>	<b>99,99%</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2022, *unaudited*

Sedangkan dari sisi pengeluaran Pembiayaan direncanakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.500.000.000,00 atau 100%. Dari ringkasan total Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah maka dapat diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran berkenaan adalah sebesar Rp. 144.194.726.716,97.

Capaian kinerja peningkatan drajat desentralisasi fiskal daerah dapat dilihat dari perkembangan perbandingan antara total PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Angka perbandingan tersebut mencerminkan tingkat ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat dilihat dari sisi pendanaan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan. Perkembangan dalam 16 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.7

Total Pendapatan dibandingkan dengan total PAD Kabupaten Karangasem

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2007	480.293.623.165,21	33.623.200.274,36	7,00
2008	612.126.712.572,74	42.201.295.825,96	6,89
2009	622.831.102.710,08	47.800.939.126,56	7,67
2010	673.678.127.602,80	62.696.409.462,92	9,31
2011	820.520.891.795,38	129.507.212.776,69	15,78
2012	907.032.277.255,20	144.019.629.474,70	15,88
2013	1.041.577.611.027,12	168.652.789.874,71	16,69
2014	1.248.392.022.005,10	239.408.124.126,12	19,18
2015	1.384.754.059.466,50	242.468.180.423,66	17,51
2016	1.392.548.134.184,20	232.602.570.475,18	16,71
2017	1.525.846.347.781,20	198.575.058.249,22	13,01
2018	1.482.949.917.227,34	200.361.246.618,41	13,51
2019	1.648.390.694.621,80	233.013.034.998,75	14,14
2020	1.455.141.988.165,53	216.682.876.355,05	14,89
2021	1.553.846.948.850,48	250.734.664.481,16	16,14
2022	1.576.818.835.558,88	301.332.231.354,78	19,11

Sumber :dirangkum dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Karangasem 2007-2022

Dilihat dari segi kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, belum mencapai 20%, hal ini menunjukkan pendanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem masih sangat ketergantungan kepada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

### **C. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022**

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, karena terus berkembang dan menyesuaikan dengan program-program yang menjadi prioritas pemerintah daerah ditetapkan melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran, demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 ditetapkan tepat waktu yaitu pada tanggal 30 Desember 2021 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Karangasem Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 13 Oktober 2022. Namun dalam rangka mewujudkan penganggaran yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, sejak ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disertai dengan penetapan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, mengalami beberapa perubahan yaitu :

1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, ditetapkan pada 22 April 2022;  
Perubahan pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa :

- a. Penempatan alokasi anggaran pada rekening belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  - b. Adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya.
2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, merupakan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2022.

## **BAB V INOVASI DAERAH**

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural set* aparatur. Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut : peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Pada tahun 2019 untuk penilaian (IGA) 2018, Pemerintah Kabupaten Karangasem masuk pada kategori Kabupaten Inovatif.

Adapun beberapa inovasi daerah yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem, baik inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun masyarakat sebagaimana tabel 5.1 dan tabel 5.2.

Tabel 5.2

Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

<b>No</b>	<b>Nama Inovasi</b>	<b>Hasil Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
1.	Program Antar Jemput Pasien	Membantu meringankan beban pasien yang memerlukan fasilitas antar jemput disertai dengan pendamping dalam rangka mengurus proses administrasi pasien	Dinas Kesehatan
2.	SANTIMAS	Program Pemberian santunan kematian masyarakat untuk meringankan beban masyarakat khususnya untuk biaya pengurusan jenazah.	Dinas Sosial
3.	Fasilitasi Ngaben Gotong Royong	Merupakan bantuan biaya untuk upacara pitra yadnya (Ngaben) untuk meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan upacara Pitra Yadnya (Ngaben)	Bagian Kesra
4.	Beasiswa Miskin	Membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan dan menaikkan angka partisipasi kasar (APK) serta angka partisipasi murni (APM) pada Kabupaten Karangasem	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5.	UHC	Membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
6.	Public Safety Center (PSC 119)	Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan ke masyarakat	Dinas Kesehatan
7.	Mall Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan publik yang semakin cepat, terjangkau	DPMPPTSP

		dan mudah	
8	Pemberian Makan Gratis untuk penunggu pasien	Meringankan beban masyarakat yang menjalani rawat inap di RSUD dan Puskesmas di Karangasem	RSUD
9	Sinergitas pengentasan gelandangan pengemis berbasis desa wisata di Kabupaten Karangasem "Desaku Menanti"	Karangasem bebas gepeng 2020	Dinas Sosial
10	Promosi Online Hasil Usaha Tenaga Kerja Mandiri	Hasil pelatihan yang telah dilaksanakan dapat dipromosikan lewat website	Dinas Ketenagakerjaan
11	Layanan mobil pusling dan mopin	Meningkatkan minat baca masyarakat, memperkenalkan keberadaan perpustakaan umum daerah kepada masyarakat	Dinas Perpustakaan
12	Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan (SIP-RFK)	Kualitas pelaporan realisasi fisik dan keuangan daerah makin baik, pemerintah dapat mengetahui dan memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan kegiatan.	Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem
11.	Aplikasi E-Dashboard Pasti Praktis BKPSDM Kabupaten Karangasem	E-Dashboard Pasti Praktis (E-Dashboard Pelayanan Administrasi Kepegawaian Karpeg, Karis, Karsu, Konversi NIP dan KPE) Pada BKPSDM Kabupaten Karangasem	BKPSDM
12.	Simetris IMB	Pengurusan IMB secara online	Dinas PUPR

Tabel 5.2  
Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Masyarakat

<b>NO</b>	<b>NAMA/KELOMPOK MASYARAKAT</b>	<b>INOVASI</b>
1	I Wayan Karya dari Kelompok Karya Sari Seraya	Tenun Kain Bebali dengan Pewarna Alam.
2	Ni Ketut Sugiartini dari Br. Sarenkauh Desa Budekeling	Kerupuk Ikan Nila
3	I Gusti Ngurah Alit dari Dusun Palak Desa Besakih	Bunga Krisan Hasil Optimal dengan Pemupukan Berimbang
4	I Wayan Pica dari Br. Perangsari Kelod Desa Duda Utara	Olahan Manisan Kurma Salak
5	I Wayan Sudarma dari Br. Dinas Belatung Desa Menanga	Penyulingan Minyak Nilam dengan Pemanasan Sederhana
6	I Ketut Latra dari Br. Dinas Tanah Ampo Desa Jungutan	Peningkatan Produktivitas Pertanian Menggunakan Pupuk Cair Organik Cimpling
7	I Wayan Sudarma dari Br. Dinas Belatung Desa Menanga	Peningkatan Produktivitas Madu Klanceng (Apis Trigona) dengan Sistem Pengembangbiakan Melalui Teknik Penyepihan
8	Kelompok Wanita Tani Putri Mandiri dari Br. Dinas Juuklegi Desa Duda Timur	Model Pengolahan Salak dengan Sistem Zero Waste
9	Banjar Adat Dukuh Penaban, Kelurahan Karangasem	Museum Pustaka Lontar.



## **BAB VI PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bagian-bagian Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2022, pelaksanaan pemerintahan sudah dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai prestasi dan keberhasilan yang diraih Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan pelayanan dasar yang terlihat dari capaian kinerja pada masing-masing OPD pelaksana urusan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah disusun tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan dan tantangan, namun itu semua bisa dilalui dengan upaya dan kerja keras seluruh jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan dukungan masyarakat dan arahan dari Bupati/Wakil Bupati sebagai nahkoda pemerintahan. Berbagai solusi dan upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, pada akhirnya bermuara pada harapan terwujudnya masyarakat Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha, Shanti Dan Nadi ("KARANGASEM PRAKERTHI NADI"). Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 disampaikan agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang. Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat dapat menyajikan sebuah data yang bisa dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja Pemerintahan Daerah serta sebagai referensi oleh berbagai stakeholder yang memerlukan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karangasem.